

**PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA JALAN HOS
COKROAMINOTO PONOROGO DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

Intan Urba Kusuma

NIM 401180053

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Kusuma, Intan Urba. 2022. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. 2022. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, dan Ekonomi Islam.

Pemberdayaan adalah strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat terutama dari keterbelakangan. Kegiatan Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto ini dilakukan dengan cara mandiri, yaitu membentuk suatu kelompok atau paguyuban dengan tujuan untuk bersama-sama mewujudkan suatu kesejahteraan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kegiatan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo, dan menganalisis pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berada Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dalam perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara beberapa PKL, observasi yaitu mengamati fakta yang ada di lapangan, dan dokumentasi. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), peneliti langsung terjun ke lapangan.

Upaya pemberdayaan yaitu membentuk kegiatan mandiri yang dilakukan dengan membentuk paguyuban, dengan tujuan mensejahterakan serta memudahkan PKL untuk memperoleh modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya upaya pemberdayaan PKL yaitu, tingginya solidaritas anatar anggota dan ketidak pedulian pemerintah. Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto dalam Perspektif Ekonomi Islam terdapat adanya prinsip *ta'awun* yang diisi dengan program ekonomi seperti, koperasi simpan pinjam, jimpitan harian, arisan, dan kegiatan tahunan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Intan Urba Kusuma	401180053	Ekonomi Syariah	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dalam Perspektif Ekonomi Islam


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.


Ponorogo, 17 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Menyetujui


Dr. Lubur Prasetivo, S.Ag., M.E.I
NIP.197801122006041002


Dr. Amin Wahyudi, M.E.I
NIP.197502072009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nama : Intan Urba Kusuma


NIM : 401180053

Jurusan : Ekonomi Syariah


Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

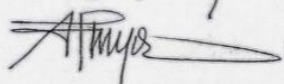
Ketua Sidang
Ridho Rokamah, S. Ag., MSI
NIP. 197412111999032002

()

Penguji I
Maulida Nurhidayati, M.Si
NIP. 198910222018012001

()

Penguji II
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I
NIP. 197502072009011007

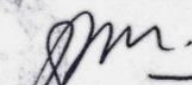
()

Ponorogo, 04 November 2022

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo





Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP. 1972071420000310

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

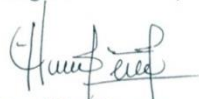
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Urba Kusuma
NIM : 401180053
Fakultas : Ekonomi Syariah
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi/Tesis : Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto
Ponorogo dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 November 2022
Yang membuat Pernyataan



Intan Urba Kusuma
401180053

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Urba Kusuma

NIM : 401180053

Jurusa : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dalam

Perspektif Ekonomi Islam

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian

tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 17 Oktober 2022

Pembuat Pernyataan



Intan Urba Kusuma

NIM 401180053

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

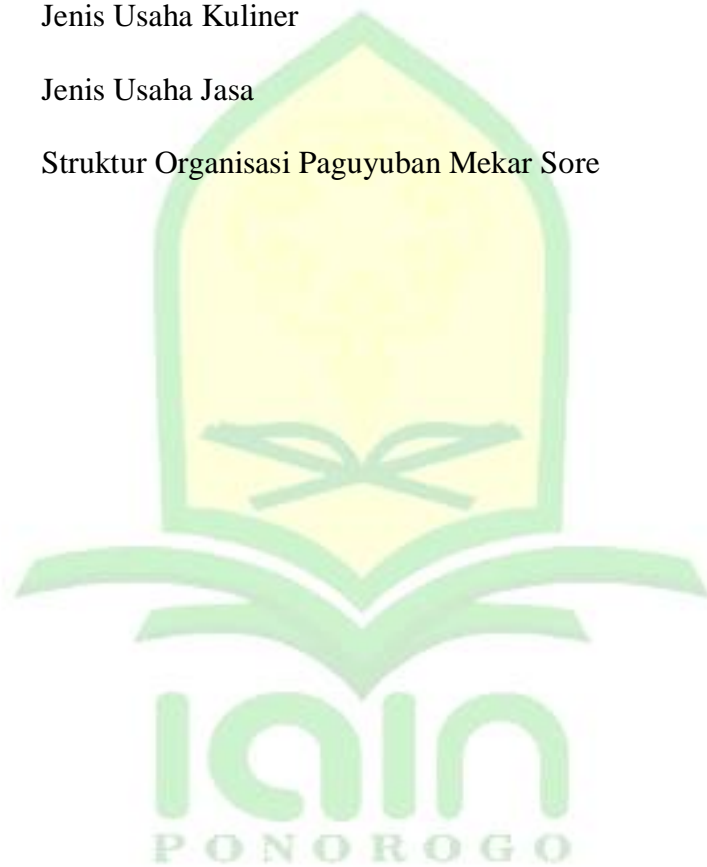
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Studi Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
2. Kehadiran Penelitian	27
3. Lokasi Penelitian.....	27
4. Data dan Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data	28
6. Teknik Keabsahan Data	30
7. Teknik Pengolaan Data	31
8. Teknik Analisis Data.....	31
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II. PEMBERDAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	35
A. Pemberdayaan dalam Islam.....	35
B. Tujuan Pemberdayaan	36
C. Prinsip-prinsip Pemberdayaan	39
D. Sasaran Pemberdayaan	45
E. Landasan Syari.....	46
BAB III. UPAYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PKL	51
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	51
B. Upaya Kegiatan Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo	56
1. Mandiri.....	56
2. Pemerintah	64

C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo	65
1. Terbentuknya Solidaritas antara PKL.....	65
2. Tidak Kepedulian Pemerintah.....	67
BAB IV. PEMBERDAYAAN PKL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	70
A. Kegiatan Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo.....	70
1. Kegiatan Mandiri.....	70
2. Dukungan Pemerintah.....	80
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo	84
C. Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dalam Perspektif Ekonomi Islam	89
BAB V. PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103



DAFTAR TABEL

Lampiran	Judul	Halaman
3.1	Nama-nama Pedagang yang Aktif	52
3.2	Nama-nama Pedagang tidak Aktif	54
3.3	Jenis Usaha Kuliner	54
3.4	Jenis Usaha Jasa	55
3.5	Struktur Organisasi Paguyuban Mekar Sore	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan adanya pemberdayaan kepada Pedagang Kaki Lima atau dapat disingkat dengan PKL, yang merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal.¹ PKL selalu saja dianggap benalu yang menghapus keindahan kota. Dengan keberadaan mereka senantiasa dianggap sebagai sesuatu yang negatif sehingga harus dengan cara-cara negatif pula untuk memberangusnya. Karena memandang PKL dalam sisi yang negatif itulah yang membuat sisi positif dari mereka tak terlihat. Oleh karenanya, Jokowi menganggap PKL harus diberdayakan karena merupakan aset potensial untuk mendongkrak perekonomian daerah. Kegigihan dan keuletan mereka untuk mencukupi perekonomian keluarganya seharusnya di fasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah.²

Menurut Soemodiningrat, dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu, Pertama, menciptakan suasana atau keadaan yang berdampak pada perkembangan potensi. Dalam hal ini memiliki titik tolak bahwasanya setiap manusia, setiap masyarakat memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Kedua memperkuat potensi atau daya yang

¹Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume 6, Nomor 1, (2011), 89.

²Hanta Yuda AR, *Jejak Para Pemimpin* (Jakarta: gramedia pustaka utama, 2014), 329-330.

dimiliki masyarakat. Ketiga, memberdayakan memiliki arti melindungi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat sendiri bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung terhadap berbagai program pemberian, karena pada dasarnya setiap yang dinikmati harus dihasilkan berdasarkan usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memupukkan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.³

Menurut Wasistiono dalam bukunya yang mengutip dari pernyataan Carlzon dan Mecauley menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi kebebasan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya serta segala keputusan dan tindakanya.⁴ Tujuan adanya pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.⁵

Pemberdayaan dalam Islam memiliki pandangan sendiri terhadap hukum pelaksanaan pemberdayaanya. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu

³Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pemberdayaan*, LSPS, 4.

⁴Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2009), 1.

⁵Sri Koeswanton W, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam pada Ibu-Ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor", *Journal Sarwahit Ilmu Pendidikan*, Volume 11, No 2, (2014), 84.

prinsip *ukhuwwah*, prinsip *ta'awun*, dan prinsip persamaan derajat. Pertama prinsip *ukhuwwah*, prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, rasa persaudaraan akan menimbulkan adanya rasa empati serta merekatkan rasa silaturahmi dalam masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan *ukhuwwah* merupakan hal yang melatar belakangi sebagai dasar upaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam prinsip ini Rasulullah memiliki visi, bahwasanya masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan bersama, melalui sabdanya “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahaan di hari kiamat kelak”.⁶

Kedua, prinsip *ta'awun*, dalam prinsip ini Allah mendorong manusia untuk saling tolong menolong sesamanya. Prinsip ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu merupakan upaya yang dilakukan dalam menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan serta bimbingan.

Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Bahwasanya adanya persamaan derajat antar umat manusia dan adanya kemuliaan di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa dalam penjelasan tersebut tercantum di dalam Al-quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Ayat tersebut juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak

⁶Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Journal Ilmu Dakwah*, Volume 39, No 1 (2019), 35.

menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi *wasilah* untuk tolong-menolong serta saling membantu satu sama lain.⁷

Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain, yaitu Az-Zukhruf ayat 32. Ayat ini mengarahkan manusia untuk saling membantu, karena manusia adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain. Sedangkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.⁸

Sebenarnya penelitian tentang pemberdayaan sudah banyak dilakukan tetapi yang terlihat dalam perspektif ekonomi Islam belum begitu banyak. Seperti halnya beberapa Penelitian menurut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Susanto yang berjudul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro”.⁹
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ervita Putri Makmuri yang berjudul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”.¹⁰
- c. Selanjutnya penelitian oleh Regita Nur Okvian dan Ertien Rining Nawangsari yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prsestasi Kota Surabaya”.¹¹

⁷ Ibid., 36.

⁸ Al-Qur'an, Az-Zukhruf ayat 32.

⁹Eko Susanto, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro,” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019), 1.

¹⁰Ervita Putri Makmuri, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat,” *Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2018), 5.

¹¹Regita Nur Okvian dan Ertien Rining Nawangsari, “Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prsestasi Kota Surabaya,” *Journal Public Administration*, Vol.1, No. 1 (2019), 59.

Kesimpulan dari beberapa penelitian diatas sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai bentuk upaya memberdayakan PKL guna mencapai kehidupan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun dalam penelitian tersebut hanya mengkaji teori sosial saja tanpa memadukan dengan kajian Islam.

Usaha kecil atau lebih dikenal dengan Pedagang Kak Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang melakukan usahanya dengan cara menjual barang dan jasa, menggunakan modal yang relatif murah serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, PKL juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. PKL merupakan usaha sektor informal berupa usaha dagang yang terkadang juga menjadi produsen. Dari aktivitas tersebut terdapat pelaku usaha yang menetap pada lokasi tertentu dan ada pula yang bergerak ketempat satu ketempat yang lain.¹²

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena keseharian yang bersifat kontroversial. Di satu sisi, pemegang otoritas kabupaten sering bersifat kurang memperdulikannya atau bahkan mengabaikannya, tetapi di sisi lain mereka dijadikan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten melalui pungutan retribusi dan dapat mengatasi permasalahan ketenaga-kerjaan diperkotaan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya dengan keberadaan PKL sering menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kota,

¹²David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* (Surabaya: Media Pustaka, 2020), 2.

diantaranya kebersihan dan keindahan lingkungan, kesemrawutan lalu lintas, potensi konflik yang relatife besar dan sebagainya.¹³

Namun demikian, persoalan PKL ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena semakin hari jumlah mereka semakin bertambah banyak dan akan berakibat pada terganggunya ruang gerak publik. Dalam hal ini sudah tentu, kebijakan kota untuk mengatasi berkaitan dengan pemberdayaan PKL ini, yang harus berangkat dari karakteristik (profil) mereka, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. Untuk itu, diperlukan data dan informasi tentang karakteristik para PKL, seperti historis usaha mereka, dari mana mereka berasal, motivasi memasuki sektor ini, latar belakang pendidikan, pengalaman dan lain sebagainya.¹⁴

PKL merupakan sebagai salah satu sumber mata pencaharian rakyat. Hal tersebut jelas membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah, terutama dalam aspek pemberdayaanya. Sebab bagaimanapun juga keberadaan PKL sangat membantu terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang berasal dari kalangan masyarakat menengah kebawah.¹⁵

Di Kabupaten Ponorogo jumlah titik pangkal PKL cukup banyak, yang tersebar pada perkotaan maupun pedesaan. Salah satu titik pangkal PKL di Kabupaten Ponorogo yaitu berada di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo. PKL tersebut melakukan aktivitasnya di daerah keramaian tepatnya di pinggir jalan trotoar perkotaan yang menawarkan berbagai produk barang maupun jasa.

¹³Asis Riat Winanto, Khusnatul Zulva Wafirotin, "Pemberdayaan Sektor Informal Di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Al Tijarah*, Volume 2, Nomor 2, (2016), 3.

¹⁴ Ibid., 1.

¹⁵ Ibid., 6.

Jumlah dari PKL sendiri terdapat kurang lebih 54 PKL tetap serta ada 10 sampai 17 anggota PKL yang tidak menetap. Jalan Hos Cokroaminoto memang merupakan salah satu tempat yang cocok dan sangat strategis bagi PKL dalam melakukan kegiatan usahanya.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada bapak Supriyadi dan bapak Fahmi Ahmad serta PKL lainnya, menunjukkan bahwa PKL menginginkan adanya pemberdayaan agar usahanya bisa lebih maju dan tetap berjalan. Beberapa alternatif kegiatan pemberdayaan yang diharapkan oleh PKL dengan adanya pelatihan kewirausahaan, pelatihan permodalan, pembentukan kelompok PKL dan kemudahan dalam memperoleh kredit.¹⁷

Alasan lain pedagang kaki lima (PKL) tersebut memilih pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mereka anggap nyata dimana dengan modal yang relatif kecil setidaknya dapat membantu memenuhi segala kebutuhan perekonomian sehari-harinya, walaupun tidak banyak menguasai ilmu kewirausahaan, keterampilan pun juga terbatas serta susahny dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini diungkapkan dari beberapa para PKL yang memiliki alasan sama.¹⁸

Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Darno selaku ketua paguyuban menyatakan bahwasanya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan usaha PKL, mereka melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan yang dilakukan yaitu pemberdayaan mandiri tanpa keterlibatan pemerintah, lebih dari itu bahwasanya PKL juga terkena retribusi,

¹⁶ Yusna Angga, *Wawancara*, 15 Februari 2022.

¹⁷ Fahmi Ahmad, *Wawancara*, 15 Februari 2022.

¹⁸ Heri Susanto, *Wawancara*, 15 Februari 2022.

dengan kata lain dalam hal ini dapat memberatkan mereka.¹⁹ Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Penanggulangan kemiskinan dan juga pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut, maka penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian yang mengangkat masalah tersebut dalam judul penelitian yaitu: “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kegiatan pemberdayaan pedagang kaki lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan pada pedagang kaki lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo?
3. Bagaimana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dalam Perspektif Ekonomi Islam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat di simpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis penyelenggaraan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo.

¹⁹ Sudarno, *Wawancara*, 20 Februari 2022.

²⁰ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Derah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), 1.

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo.
3. Menganalisis pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktisi

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi pedagang kaki lima yang berkaitan dengan pemberdayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo khususnya. Serta nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian dimasa depan.

2. Manfaat Praktisi

- a. Dapat menambah sumbang sih pemikiran kepada masyarakat luas mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan pada pedagang kaki lima serta solusi yang digunakan yaitu dalam memberdayakan pedagang kaki lima dan bagi Pemerintah.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan yang digunakan sebagai persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan serta

menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini:

Penelitian oleh Tsalisa Putriani Rachim (2018) dengan judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Skywalk Teras Cihampelas)”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya pemberdayaan adalah suatu kegiatan untuk memberdayakan seseorang agar lebih berguna dengan lima pendekatan yaitu, pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyongkongan dan pemeliharaan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka dan studi lapangan, diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan PKL Skywalk Teras Cihampelas ditinjau dari lima pendekatan, pendekatan pemungkinan dan pendekatan penguatan dalam proses pemberdayaan belum berjalan. Sedangkan pendekatan perlindungan, pendekatan penyongkongan dalam proses pemberdayaan sudah berjalan, serta pendekatan pemeliharaan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan berjalan.²¹ Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu diantaranya, penelitian yang membahas mengenai pemberdayaan, adanya persamaan metode yang digunakan, serta persamaan teknik pengumpulan data. Selanjutnya perbedaanya, penelitian yang dilakukan

²¹Tsalisa Putriani Rachim, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Skywalk Teras Cihampelas),” *Skripsi* (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2018).

oleh Tsalisa Putriani Rachim mengkaji pemberdayaan secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji pemberdayaan yang akan diimplementasikan terhadap perspektif ekonomi Islam.

Penelitian dari Dwi Aryani Mega (2018) dengan judul “Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar”. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwasanya pemberdayaan yang dilakukan di kota Makassar telah memberikan dampak yang positif yang dibuktikan dengan adanya perkembangan pedagang dengan lebih memahami tentang kebersihan dan kertiban dalam berdagang. Proses dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Makassar dilihat dari strategi pemberdayaan dan tehnik pemberdayaan pedagang kaki lima yang terkhusus di kota Makassar ini sudah dikatakan cukup berhasil. Model pemberdayaan yang dilakukan yaitu pemberian solusi dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi bagi pedagang dengan cara mempertemukan pedagang kepada yaitu, distributor langsung serta para usaha kemitraan.²² Persamaan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai pemberdayaan PKL. Sehingga dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan dapat berdampak positif terhadap PKL. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya dalam penelitian ini proses pemberdayaan PKL dilihat dari strategi pemberdayaan dan tehnik pemberdayaan PKL. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat dari adanya kegiatan program-program pemberdayaan yang dilakukan secara mandiri.

²²Dwi Aryani Mega, “Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar,” *Journal Profitability Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 2, (2018).

Skripsi karya Ema Indriani (2018) dengan judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya proses pemberdayaan pada Pedagang Kaki Lima di daerah Alun-alun simpang Pematang yang dilihat dari strategi pemberdayaan serta teknik pemberdayaan para pedagang kaki lima khususnya yang berdagang di Alun-alun Simpang Pematang dikatakan berhasil, dikarenakan adanya pelatihan yang dilakukan sehingga dapat membantu PKL dalam berinovasi makanan yang mereka jual. Sedangkan dari segi PKL sendiri pendapatan yang diperoleh meningkat akibat adanya pelatihan yang berakibat PKL dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam segala proses pemberdayaan, indikator-indikator yang ada dapat terpenuhi sebagai manfaat dari pemberdayaan tersebut.²³ Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji pemberdayaan PKL, selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada program pemberdayaan yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ema Indriani terdapat keberhasilan pemberdayaan dikarenakan adanya pelatihan agar PKL dapat berinovasi dalam menjalankan usahanya. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat program pemberdayaan yaitu diantaranya, jimpitan, koperasi simpan pinjam, arisan, kegiatan tahunan, dengan adanya program ini digunakan sebagai penguatan permodalan.

²³Ema Indriani, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi* (Lampung: IAIN METRO, 2018).

Penelitian oleh Dian Lestari (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga”. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang banyaknya jumlah PKL yang tersebar di Kota Salatiga tidak menepati ruang-ruang yang diperuntukan bagi PKL sehingga memunculkan banyak permasalahan yang membuat pemerintah setempat harus mengaturnya. Dalam penataan, pengelolaan dan pemberdayaan PKL di Kota Salatiga pemerintah memiliki peraturan yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah masih banyak PKL yang menempati zona terlarang dan belum sesuai dengan tempat yang disarankan serta sosialisasi PKL dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tim pelaksanaan sosialisasi adalah Dinas Perdagangan yang bekerjasama dengan Kecamatan dan tokoh masyarakat.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, sama-sama mengkaji mengenai pemberdayaan PKL yang di latarbelakangi banyaknya jumlah PKL, contohnya yang tersebar di Kota. Sehingga memunculkan banyak permasalahan yang membuat pemerintah setempat harus mengaturnya. Perbedaan dari kedua penelitian ini, bahwasanya penelitian oleh Dian Lestari

²⁴Dian Lestari, “Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga,” *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, Volume 2, Nomor 2, (2018).

terfokus terhadap kebijakan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga. Sedangkan penelitian oleh penulis hanya terfokus terhadap pemberdayaan PKL.

Penelitian oleh oleh Eko Susanto (2019) yang berjudul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro”, dari hasil yang diperoleh bahwasanya pemerintahan kota Metro telah melakukan pemberdayaan tetepai belum maksimal. Pemerintahan kota Metro harus tetap melakukan inovasi dalam memperdayakan pelaku PKL. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cendrawasih Kota Metro, pemerintahan kota Metro telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL yang telah sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2008 tentang beberapa aspek pengelolaan PKL.²⁵ Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaanya yaitu sama-sama mengkaji pemberdayaan PKL. Selanjutnya perbedaanya, dalam penelitian yang dilakukan Eko Susanto bahwasanya terdapat pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintahan pada kota Metro. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pemberdayaan yang dilakukan secara mandiri oleh PKL.

Selanjutnya yaitu penelitian dari Nurhadi (2019) yang berjudul “Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam”. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya PKL merupakan sebuah usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan mampu bersaing ditengah persaingan ekonomi. Keberadaan PKL ini sendiri biasanya dilatar belakang dengan

²⁵Eko Susanto, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro,” *Skripsi* (Lampung: IAIN METRO, 2019).

adanya soal minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, upaya bertahan hidup, minimnya modal usaha, aturan, dan birokrasi yang rumit, pekerjaan sementara dan faktor keturunan serta profesi menjadikan usaha PKL sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Pandangan Islam terhadap PKL adalah sebagai wujud berkerja keras, namun dalam pelaksanaannya pun PKL harus memenuhi aturan-aturan dalam syariat, seperti jujur, amanah, tidak menipu dan menepati janji.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama mengkaji pemberdayaan yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Sedangkan perbedaan penelitian Nurhadi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya.

Penelitian oleh Regita Okvian, Ertien Rining Nawangsari (2019) berjudul “Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya”. Dari penelitian tersebut terdapat beberapa analisis strategi pemberdayaan PKL di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya yang dianalisis menggunakan fokus diantaranya pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal swadaya, pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat guna. Dari berbagai analisis strategi yang dilakukan dalam memberdayakan pedagang kaki lima di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya telah mampu memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan dan kemajuan pedagang kaki lima yang berada di sentra tersebut berdasarkan

²⁶Nurhadi, “Pedagang Kaki Lima Perspektif Islam,” *At-Tamwil: Artikel Kajian Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, (2019).

masing-masing strategi yang telah diterapkan.²⁷ Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai pemberdayaan PKL. Selanjutnya terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang dilakukan oleh Regita Okvian, Ertien Rining Nawangsari terfokus terhadap berbagai analisis strategi yang dilakukan dalam memberdayakan pedagang kaki lima di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus terhadap upaya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan PKL, faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberdayaan dan pemberdayaan didalam perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian oleh Yureta Wahyu Caesar (2019) dengan judul penelitian “*Analisis Community Empowerment Berbasis Retail Location Decision* dalam Kebijakan Pemberdayaan dan Penataan PKL (Studi Kasus PKL Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemberdayaan PKL Taman Pinang Indah melalui *Community Empowerment* dan menilai TPI serta tempat relokasi menggunakan *Retail Location Decision*. Permasalahan PKL merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum di dalam RKP. Kasus PKL di Taman Pinang Indah Sidoarjo merupakan sebuah kasus yang berkepanjangan dari tahun 2014 hingga sekarang masih belum mendapatkan solusi. Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sudah membuat kebijakan untuk mensterilkan kawasan Taman Pinang Indah dari PKL dengan merelokasinya ke Panti dan Gor. Namun dalam hal ini PKL masih melanggar dengan kembali ke lokasi yang

²⁷Regita Okvian, Ertien Rining Nawangsari, “Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya,” *Journal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor, (2019).

dilarang untuk berjualan. Kondisi ini membuktikan tidak berjalan baiknya kebijakan pemberdayaan dan penataan PKL yang tercantum dalam Perda No.3 Tahun 2016 oleh Pemkanb Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dan kualitatif (campuran) dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi penelitian dan materi audio serta visual. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber data, sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa pemberdayaan PKL di Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo belum mampu memenuhi kriteria *addressing community concerns* namun sudah mampu melaksanakan *evaluation to share ideas and vision* dengan beberapa kekurangan serta sudah mampu memenuhi kriteria *building community capacity*. Sementara analisis *retail location decision* membuktikan bahwa Taman Pinang Indah lebih unggul dari tempat relokasi.²⁸ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama mengkaji penelitian mengenai pemberdayaan PKL, selain itu juga terdapat persamaan teknik pengumpulan dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya perbedaanya terdapat pada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya menggunakan metode kualitatif saja.

Penelitian oleh Bangun Dwi Anjaya (2019) dengan judul “Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

²⁸Yureta Wahyu Caesar, “Analisis Community Empowerment Berbasis Retail Location Decision dalam Kebijakan Pemberdayaan dan Penataan PKL (Studi Kasus PKL Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo),” *Skripsi* (Surabaya: Universita Airlangga, 2019).

Klaten dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Penelitian ini berawal dari keyakinan dari penulis adanya masalah atau penindakan hukum yang kurang tepat terkait masalah penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah yang memiliki jalan nasional baik itu yang berada di Kabupaten Klaten, dengan demikian menjadi suatu tempat yang strategis untuk PKL dalam menjajakan dagangannya, akan tetapi seringkali dijumpai adanya banyak pelanggaran terkait waktu usaha dan lokasi berdagangnya yang mana dalam hal ini membuat pemandangan menjadi kurang bagus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yaitu melakukan kajian hukum dengan penelitian berdasar pada pendekatan dari ketentuan hukum yang berlaku dan sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa faktor yang menjadi penghambat penindakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam penegakan penataan dan pemberdayaan PKL, kurangnya kerjasama dengan Instansi lain dan juga masih kurangnya SDM satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, ditambah dengan kurangnya anggaran untuk kegiatan patrol rutin serta kurangnya anggota PPNS.²⁹

²⁹Bangun Dwi Anjaya, “Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pemberdayaan PKL. Perbedaanya, penelitian oleh Bangun Dwi Anjaya menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*).

Penelitian oleh Nurathirah Aprillah Norman, Andi Rosdianti Razak dan Rulinawaty Kasmad (2020) dengan judul penelitian “*Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Adaptive Governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan PKL. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yaitu kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu tujuh orang dari enam Instansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Adaptive Governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada pemberdayaan PKL sudah berjalan dengan baik terbukti dengan perkembangan PKL tidak lagi menggunakan jalan umum untuk berdagang. Walaupun terdapat sedikit hal yang perlu dibenahi agar PKL merasa puas dengan hasil kerja pemerintah. Faktor yang mempengaruhi yaitu pemerintah memberikan lokasi baru untuk PKL berdagang dan tidak lagi memakai jalan umum yang mengganggu pengguna jalan.³⁰ Persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai pemberdayaan PKL. Perbedaanya,

³⁰Nurathirah Aprillah Norman dkk, “*Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju,” *Jurnal KIMAP*, Volume 1 , Nomor 1, (2020).

penelitian oleh Nurathirah Aprillah Norman, Andi Rosdianti Razak dan Rulinawaty Kasmad menganalisis mengenai *Adaptive Governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan PKL. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menganalisis upaya pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto, Faktor yang melatarbelakangi, serta pemberdayaan yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian dari Sheila Lucky Octaviani dan Ardiana Yuli Puspitasari (2021) yang berjudul “Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima (PKL)”. Dari penelitian ini terdapat kesimpulan bahwasanya keberadaan pedagang kaki lima memiliki dampak positif maupun negatif bagi perkotaan. Pedagang kaki lima berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian perkotaan, sedangkan dampak negatif dengan keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan adanya beberapa permasalahan diantaranya terganggunya keindahan kota, kebersihan, keamanan, dan kemacetan lalu lintas. Penelitian mengenai PKL dalam penelitian ini diambil dari studi kasus pada Alun-alun Kabupaten Tulungagung, Pasar Tanah Abang dan Pasar Tuah Kilometer 4 di Kecamatan Tualang Perawang. Penataan mengenai Pemberdayaan PKL di Alun-alun Kabupaten Tulungagung daerah dilakukan dengan adanya kegiatan sosialisasi dan promosi pembentukan paguyuban, serta bantuan yang berbentuk perbaikan sarana prasarana. Selanjutnya Pemberdayaan di Tanah Abang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan usaha, pemberian modal, bantuan sarana berdagang, penguatan

kelembagaan, memfasilitasi dalam produksi, promosi, serta bimbingan teknis. Sedangkan pemberdayaan pada Pasar Buah Kilometer 4 di Kecamatan Tualang Perawang pemberdayaan dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan investor untuk mendapatkan dana sebagai modal pembangunan kios, bimbingan dan penyuluhan mengenai manajemen usaha, serta bimbingan dalam meningkatkan modal.³¹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai pemberdayaan PKL. Selanjutnya perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian Sheila Lucky Octaviani dan Ardiana Yuli Puspitasari membahas mengenai penataan dan pemberdayaan Sektor Informal: PKL. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya terfokus terhadap pemberdayaan PKL saja dan yang dikaitkan dengan pemberdayaan dalam perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian dari Mita Handayani (2021) berjudul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya dari hasil peneliti lakukan terhadap dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima tidak berjalan sebagaimana mestinya yang seharusnya sesuai dengan regulasi yang ada yaitu peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hal lain yang dijelaskan peneliti bahwasanya tidak adanya program pemberdayaan seperti pelatihan, akses permodalan, fasilitas bantuan sarana dagang, serta kurangnya kepedulian

³¹Sheila Lucky Octaviani, Ardiana Yuli Puspitasari, “Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima,” *Jurnal Kajian Ruang*, Volume 1, Nomor 1, (2021).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap para pedagang kaki lima yang berada di pasar swasta.³² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama menganalisis mengenai adanya pemberdayaan PKL. Sedangkan perbedaannya, dari penelitian Mita Handayani adanya kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapatnya pemberdayaan secara mandiri.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herwansyah (2021) dengan judul “Kebijakan Hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Studi Kasus Kawasan Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya secara poin besar pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan pasar pagi Kotabumi belum terlaksana dengan baik. Penulis menemukan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL belum berjalan sesuai harapan semua pihak, (pemerintah daerah, masyarakat serta PKL itu sendiri). Konsep penataan PKL di kawasan pasar pagi kotabumi dapat dikatakan masih sebatas pengurusan dan penertiban. Sehingga dalam hal ini belum mampu menyelesaikan persoalan secara substansif, dengan kata lain belum maksimalnya upaya pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dan semua pihak dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap PKL sebagai bagian dari

³² Mita Handayani, “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”, *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021).

sektor ekonomi kerakyatan yang turut serta dalam pembangunan bangsa.³³ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama belum adanya upaya pemberdayaan yang maksimal dari pemerintah, sehingga dalam hal ini belum mampu menyelesaikan persoalan secara substansif. Selanjutnya perbedaan terletak pada fokus dan objek yang diteliti. Penelitian oleh Herwansyah terfokus terhadap kebijakan hukum pemberdayaan dan juga penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Studi Kasus Kawasan Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dikaji hanya pemberdayaan yang dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam.

Penelitian yang dilukan oleh Reviva Fachrunissa, Gita Susanti, dan Andi Ahmad Yani (2021) dengan judul “Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Makassar. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya evaluasi mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam menata dan memberdayakan PKL, dikawasan Kanrerong ini dikatakan belum efektif secara keseluruhan. Pelaksanaanya telah menciptakan keamanan dan kebersihan pada kawasan Kanrerong serta telah memperhatikan kepentingan umum, namun tujuanya untuk mendukung wisata kuliner khas kota Makassar serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan PKL belum merata kepada seluruh PKL. Efesiensi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dinilai masih kurang efesiensi dalam pengangguran karena belum ada anggaran tersendiri yang dikhususkan

³³Herwansyah, “Kebijakan Hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Studi Kasus Kawasan Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara,” *Journal Penelitian*, Volume 1, Nomor 1, (2021).

untuk memberdayakan PKL yang telah direlokasi ke kawasan Kanrerong.³⁴ Persamaan yang terdapat yaitu penelitian yang secara garis besar membahas mengenai pemberdayaan PKL. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Reviva Fachrunissa, Gita Susanti, dan Andi Ahmad Yani terdapat permasalahan belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk memberdayakan PKL yang telah direlokasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis permasalahan yang ada yaitu, adanya keinginan PKL untuk menguatkan usaha mereka dengan membentuk kegiatan pemberdayaan secara mandiri.

Penelitian oleh Santy Sriharyati dan Milla Marlina (2021) dengan judul penelitian “Penataan Pasar sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat”. Dalam penelitian ini bahwasanya dijelaskan kurangnya koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah pasar tradisional dikarenakan belum adanya kebijakan pemerintah di daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga berdampak terhadap belum tertanamnya pola perilaku masyarakat yang baik. Adapun metode pengumpulan data secara umum terbagi dua yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Penataan pedagang di pasar Tradisional Sindangkerta merupakan salah satu alternatif pemecah masalah kesmrawutan jumlah pedagang, khususnya PKL.³⁵

Persamaan dengan penelitian ini yaitu, belum adanya kebijakan pemerintah di

³⁴Reviva Fachrunissa dkk, “Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Makassar,” *Jurnal DPMR*, Volume 1, Nomor 2, (2021).

³⁵Santy Sriharyati dan Milla Marlina, “Penataan Pasar sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Admistrasi Bisnis*, Volume 7, Nomor 1, (2021).

daerah yang mengatur pemberdayaan PKL. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek serta fokus penelitian yang dibahas.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitiannya, skripsi ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan serta dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.³⁶

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁷

³⁶ Albi Anggiti dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

³⁷ *Ibid.*, 8.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi *realitas* atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.³⁸

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode lapangan atau *field research* digunakan ketika survei atau pun *eksperimen* dirasakan tidak praktis atau ketika lapangan penelitian masih terbentang demikian luasnya. Sehingga, jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya.³⁹

Jadi dalam penelitian ini menyangkut mengenai Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Ekonomi Islam yang dirancang dengan menggunakan studi kasus, maka peneliti berusaha melihat secara mendalam permasalahan tersebut pada PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo.

³⁸Ibid., 9.

³⁹Bagus Eko Dono, *Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Siswa* (Bondowoso: Guepedia, 2021), 22.

2. Kehadiran Penelitian

Pada penelitian kualitatif, perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat digunakan, tetapi fungsinya sebagai pendukung tugas peneliti. Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan.⁴⁰ Sedangkan pada penelitian ini, kehadiran dan peran peneliti di dalam kancah penelitian secara (hampir) terus menerus dalam waktu yang tidak sebentar sangatlah penting, artinya agar dapat menghayati hal-hal yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan peneliti adalah pihak yang merasakan adanya masalah yang perlu diselesaikan dan paling berkepentingan dengan pemecahan masalah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini akan dikhususkan yaitu di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo.

4. Data dan Sumber data

a. Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Oleh karena itu untuk

⁴⁰ Sutikno, *Strategi dan Teknik Penelitian* (Medan :Guepedia, 2022), 21.

mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo untuk mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan PKL.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁴¹ Data primer penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini antaranya yaitu:

a. Observasi

Merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴² Metode observasi suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan pendahuluan atau survei lapangan terhadap kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo. Untuk memperoleh gambaran kegiatan dan pengamatan

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

⁴²Ibid., 145.

keadaan para pelaku pedagang kaki lima didaerah tersebut secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Teknik wawancara pada penelitian ini adalah teknik wawancara tak berstruktur.⁴³ Teknik wawancara tak berstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mewancarai secara langsung dan terbuka para pelaku usaha, untuk mengetahui dan menemukan upaya kegiatan pemberdayaan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo. Sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁴ Dokumen pada tulisan ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersumber dari dokumentasi tertulis sesuai dengan yang diperlukan penulis dan penelitiannya. Adapun hasil

⁴³Ibid., 137.

⁴⁴Ibid., 240.

dari dokumentasi tersebut nantinya akan berupa foto-foto kegiatan para pelaku Usaha pedagang kaki lima serta dokumentasi tertulis data kelompok para pedagang kaki lima di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo.

d. Triangulasi atau Gabungan

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mulai data dari hasil wawancara dengan pihak PKL dan juga pihak pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidangnya. Pengumpulan data dengan triangulasi ini, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dari berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁴⁵

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan atau sebagai pembanding terhadap data

⁴⁵Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R dan D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 168.

tersebut). Teknik triangulasi ini dipilih adalah teknik triangulasi data agar dapat menguji tingkat kepercayaan di lapangan.

7. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini data sementara yang terkumpul, selanjutnya data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengelolanya kembali

8. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide.⁴⁶

Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terdapat tiga alur kegiatan pada penelitian kualitatif diantaranya:

- a. Pengumpulan data, upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

⁴⁶Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: FTK Ar-Raniry Press Syariah, 2006), 59.

- b. Reduksi data, proses pemulihan, pemberian fokus, penyederhanaan abstraksi dan transformasi data (kasar) yang muncul catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
- c. Penyajian data, susunan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memeriksa penyajian data akan memudahkan memknai apa yang harus dilakakukan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Penarikan kesimpulan, kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran menganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjaun ulang atau peninjauan kembali pada catatan-catatan lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam hasil penelitian dan agar kajian ini dapat dicerna dengan mudah serta sistematis, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dengan mengelompokan ke dalam enam bab yang diantaranya:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai adanya gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran keseluruhan skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berfungsi untuk menjelaskan landasan teori yang memuat berbagai pengertian dan juga sifat-sifat yang diperlukan didalam pembahasan

di bab berikutnya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian. Bab ini berisi tentang teori pemberdayaan dalam Islam yang meliputi, pengertian pemberdayaan, tujuan pemberdayaan, prinsip-prinsip, sasaran pemberdayaan dan landasan Syari.

BAB III PAPARAN DATA.

Bab ini berisi paparan data baik dari data inti yang dibutuhkan sebagai penyelesaian perumusan masalah maupun data pendukung sebagai data pengantar. Data diantaranya, gambaran umum mengenai objek penelitian, stuktur organisasi, visi misi, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pemberdayaan, serta pemberdayaan yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini berfungsi sebagai proses penafsiran data peneliti menggunakan teori, sehingga dapat dipecahkan permasalahan serta menarik jawaban dan juga kesimpulan yang berangkat dari rumusan masalah. Analisis yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya: upaya kegiatan pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo, faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberdayaan, dan pemberdayaan PKL dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan pernyataan singkat mengenai hasil dari analisis deskripsi tentang penelitian tersebut. Saran bagian penutup yang berisi

sanggahan atau sebuah komentar yang berguna untuk memberikan solusi dari adanya permasalahan.



BAB II

PEMBERDAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pemberdayaan dalam Islam

Pemberdayaan secara bahasa berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Sedangkan berdaya memiliki arti kekuatan. Dari kedua arti di tersebut, bahwasanya pemberdayaan merupakan dorongan yang membuat sesuatu yang lemah menjadi lebih memiliki kekuatan.¹ Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat yang miskin atau pun terpinggirkan untuk menyampaikan pendapatnya, kebutuhan, pilihan-pilihannya, serta berpartisipasi demi perbaikan kehidupannya.²

Islam mengimplementasikan pemberdayaan sendiri sama halnya dengan menunaikan perintah zakat. Dapat dibuktikan dengan adanya potensi dan pemberdayaan zakat sudah ada pada zaman Rasulullah, yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan umat. Bahkan jika zakat benar-benar dikelola secara baik dan adil, bukan tidak mungkin tidak akan ada lagi orang atau warga negara yang merasa kekurangan. Pernyataan disamping jelas membuktikan bahwasanya tujuan dengan adanya zakat tidak

¹Erni Isnaeniah, *Bersinergi Positif di Tengah Pandemi Bersama Warga* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 243.

²Ibid., 76.

lain sama halnya dengan pemberdayaan, yaitu sebuah upaya yang dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.³

Istilah pemberdayaan dalam bahasa arab atau Islam di sebut dengan *Tamkim*. Kata *Tamkim* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, serta memiliki kedudukan atau tempat. Pengertian-pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi sama dengan istilah pemberdayaan, di mana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memimiliki kesempatan untuk meraih kekuasaan ke tangan mereka, menyalurkan kekuasaan dari kaum mempunya kepada kaum yang tidak mempunya dan seterusnya.⁴ Berangkat dari beberapa penjelasan mengenai pemberdayaan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya pemberdayaan secara ekonomi maupun dalam Islam, memiliki makna yang sama yaitu menjadikan masyarakat yang lemah atau keterbelakangan menjadi lebih berdaya sehingga akan terciptanya kesejahteraan sosial bagi setiap manusia yang harus dijadikan langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.⁵

B. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari adanya pemberdayaan dalam ekonomi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Seperti halnya yang dikemukakan oleh beberapa diantaranya:

³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media Anggota IKAPI, 2006), 59.

⁴Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkim Fiqih Pemberdayaan* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 75.

⁵Safri Miradj dan Imam Shofwan, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal* (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), 16.

- a. Menurut Sulistiyani tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemberdayaan ini adalah untuk membentuk individu maupun masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian yang dimaksud yaitu meliputi kemandirian dalam berfikir, bertindak, dan mengendalikan segala sesuatu yang mereka lakukan. Dalam mencapai kemandirian tersebut masyarakat harus belajar melalui proses demi proses, maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan dari waktu ke waktu.⁶
- b. Menurut Suryana menjelaskan tujuan dengan adanya pemberdayaan masyarakat membentuk individu dan menjadikan masyarakat mandiri.⁷
- c. Sedangkan menurut Wijaya, mengatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.⁸

Dalam Islam pun dijelaskan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap umat manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin hidup dalam kondisi sejahtera. Tindakan apapun yang bertentangan dengan aspek kesejahteraan sangat tidak sejalan dengan ajaran Islam. Islam adalah agama yang menginginkan umatnya hidup dalam kesejahteraan, karena ia adalah awal dari lahirnya kemaslahatan. Untuk

⁶ Hairudin La Patilaiya, *Pemberdayaan Masyarakat* (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 9.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

mencapai kemaslahatan setiap manusia harus memiliki kemerdekaan secara ekonomi.⁹

Syariat Islam merupakan ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan manusia juga di dalamnya mengatur tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan yang berdasarkan dengan perspektif ekonomi Islam bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai aspek duniawi maupun ukhrawi. Maka dari itu pentingnya adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada paradigma Islam.¹⁰

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwanya Islam mencerminkan konsep pemberdayaan sama seperti halnya dengan melakukan perintah zakat, yang tercantum didalam Al-Quran. Zakat merupakan salah satu ibadah yang utama dalam ajaran Islam. Zakat berasal dari kata *zaka yazkuu* yang berarti berkah, tumbuh suci dan bersih. Qaradawi mengatakan, perintah untuk berzakat seringkali berdampingan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah shalat yaitu sebanyak 27 kali. Hal ini menunjukkan pentingnya kedudukan zakat dalam Islam.¹¹

Zakat mempunyai makna ibadah dalam rangka ber-*taqarrub* kepada Allah, selain itu zakat juga mempunyai dimensi sosial berupa pemberdayaan masyarakat dan keluarga miskin. Zakat juga dapat difungsikan untuk meratakan pendapatan, serta mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si

⁹Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam," *Journal Syar'ie*, Vol. 3 Nomor 2 (2020), 11-12.

¹⁰Ayumila Kurnia, "Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Program Kotaku," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 1 (2020), 51.

¹¹Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an," 37.

miskin. Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa zakat dapat berperan secara efektif mengurangi angka kemiskinan *mustahiqnya*.¹²

Dalam pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya tujuan pemberdayaan secara umum maupun Islam sebenarnya memiliki makna atau maksud yang sama, yaitu sama-sama memiliki tujuan ingin mensejahterakan masyarakat yang tak berdaya. Namun yang membedakan ialah, dalam Islam lebih mencerminkan konsep pemberdayaan yang berlandaskan pada syariat agama, yaitu salah satunya pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pada perintah zakat yang tujuannya tidak hanya mensejahterakan umat saja tetapi memiliki makna ibadah dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT serta menjelaskan pentingnya pemberdayaan yang berdasarkan dengan perspektif ekonomi Islam agar nantinya dapat menyeimbangkan berbagai aspek diduniawi dan ukhrawinya.

C. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan prinsip-prinsip mengenai pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip yang harus diterapkan, yaitu diantaranya:¹³

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.

¹²Ibid., 38.

¹³ Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, 11.

Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan seseorang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian¹⁴

Prinsip ini merupakan prinsip yang lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Bantuan orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak malah melemahkan tingkat keswadayaanya.

¹⁴Ibid., 12.

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung adanya pengetahuan, yang semua itu harus digali dan dijadikan proses dasar dalam pemberdayaan, seperti mengetahui kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi-kondisi lingkungannya, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Dengan demikian, individu yang terlibat dalam pemberdayaan tersebut dapat mengembangkan potensi serta memecahkan masalah yang ada pada dirinya guna terwujudnya kesejahteraan kehidupan agar tidak terus menerus bergantung kepada pihak mana pun.¹⁵

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang agar dapat berkelanjutan., sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

¹⁵ Ibid.

Menurut Aziz prinsip pemberdayaan secara ekonomi dapat dibedakan menjadi lima prinsip pemberdayaan masyarakat diantaranya:¹⁶

a. Prinsip ekologis

Merupakan prinsip pemberdayaan yang tidak memaksa atau pemberdayaan yang dilakukan dari lapisan bawah masyarakat (*bottom up*) tanpa dipaksa dan didikte oleh siapa pun.

b. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial yaitu prinsip yang menjamin tidak memperkuat bentuk penindasan struktural, tetapi menghadapi dan melawan segala bentuk penindasan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

c. Prinsip Lokalitas

Prinsip ini merupakan prinsip yang menghargai yang lokal, prinsip pemberdayaan yang mengutamakan budaya, sumber daya dan potensi lokal dan partisipasi masyarakat yang diberdayakan.

d. Prinsip Proses

Prinsip proses yaitu prinsip yang menghargai sebuah proses, sehingga visi, misi dan proses terintegrasi dengan baik.

e. Prinsip Global dan Lokal

Prinsip pemberdayaan yang terintegrasi antara sumber lokal dengan sumber global, prinsip ini mengarahkan kepada perhatian isu

¹⁶Anas Habibi Ritonga, *Gerakan Dakwah Muhammadiyah dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi* (Lampung: CV. Agree Media Publishing, 2020), 67.

global yang bisa mempengaruhi isu lokal, sehingga masyarakat siap menghadapi tantangan pada masa yang datang.

Sedangkan Islam menjelaskan ada tiga prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat diantaranya:¹⁷

- a. Prinsip *ukhuwwah* atau persaudaraan, Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain, dalam rangka *ukhuwwah Islamiyah* dan *ukhuwwah insaniyah*.
- b. Prinsip ta'awun, menegaskan bahwa program pemberdayaan adalah tanggung jawab bersama dan harus berlandaskan sinergi yang efektif antara pemangku kebijakan, praktisi dan penggiat sosial, serta masyarakat luas.
- c. Prinsip persamaan derajat, di mana Islam menekankan kesamaan derajat antara umat manusia.

Dalam Islam pun dijelaskan bahwasanya manusia dijadikan *khalifah* di muka bumi ini antara lain untuk memakmurkan bumi. Pernyataan ini banyak sekali ditemui dalam penafsiran-penafsiran mufassir dalam ayat peneliti bahasa. Untuk mempertahankan ekstensi dan fungsinya sebagai *khalifah*, manusia bekerja sesuai profesi dan keahliannya. Manusia pun bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem, dalam konteks Al-Quran memandang manusia sebagai “wakil” atau *Khalifah* Allah di bumi untuk mengfungsikan

¹⁷Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an,” 43.

kekhalifahannya, karena Tuhan telah melengkapi manusia berupa potensi intelektual dan spiritual sekaligus.¹⁸

Kata *khalifah* juga mengandung makna pengganti Nabi Muhammad saw dalam fungsinya sebagai kepala Negara, yaitu pengganti Nabi Muhammad saw dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam baik urusan agama maupun dunia.¹⁹ Kehadiran dan keberadaan pemerintah dimaksudkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekali pun membutuhkan layanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan masyarakat sehari-hari erat kaitannya dengan fungsi pemerintah.²⁰

QS. Al-Rad'd (13): 11. Potongan ayat ini mengisyaratkan, bahwa Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kondisi dalam masyarakat, selama mereka tidak berusaha untuk mengubah sebab-sebab kemunduran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, harus ada upaya dari golongan manusia, terutama golongan yang berkuasa (pemerintah) untuk mengubah keadaan masyarakatnya, melalui penerapan sistem ekonomi yang kondusif dan akomodatif.²¹

¹⁸Sunardi, Leo Agung, "Peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi perspektif ekologis dalam ajaran islam" *Jurnal Wasiqotul*, Volume 12, Nomor 2, (2018), 360.

¹⁹Rahmat Ilyas, Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Volume 1, Nomor 7, (2016), 176.

²⁰Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, 17.

²¹Bustami, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Ekonomi Islam* (Ciputat: Penerbit A-Empat, 2015), 7-8.

Dalam pernyataan diatas, baik dari prinsip pemberdayaan ekonomi maupun Islam telah dijelaskan bahwasnya pelaksanaan dengan adanya kegiatan pemberdayaan akan berjalan dengan baik apabila ada tindakan yang maksimal bagi seseorang atau atasan yang berkomitmen tinggi salah satu contohnya yaitu pemerintah, oleh karena pemerintah sebagai golongan manusia yang berkuasa harus mampu berusaha membantu dalam perubahan suatu keadaan menjadi lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan yang diinginkan.

D. Sasaran Pemberdayaan

Sasaran pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi maupun Islam memiliki sasaran yang sama, yaitu masyarakat yang lemah dari berbagai bidang baik bidang ekonomi, sosial maupun bidang lainnya. Sedangkan sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumber dana produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan, sehingga tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat yang berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.²²

Pada dasarnya sasaran dengan adanya pemberdayaan ini adalah untuk mendorong pembangunan di bidang ekonomi agar dapat mencapai hasil yang maksimal, terutama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Dengan melakukan

²²Hiruddin La Patilaiya, *Pemberdayaan Masyarakat* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 18.

pemberdayaan berarti memperkuat posisi ekonomi kerakyatan, dimana basisnya adalah masyarakat menengah ke bawah sebagai pelaku ekonomi utama, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian menuju kemandirian ekonomi bangsa dan negara.²³

E. Landasan Syari

Menurut perspekti Al-Qur'an ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membantu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan ialah melaksanakan dan mendorong adanya program zakat, karenan zakat sangat ampuh mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan dan keterbelakangan. Serta dalam pelaksanaan pengelolaanya pun dituntut lebih efisien dan profesional, demi mewujudkan pemberdayaan yang lebih efektif.²⁴

Nabi Muhammad bersabda di dalam hadistnya sebagai berikut:

تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: zakat itu diambil dari orang kaya diantara mereka dan dikembangkan kepada orang-orang fakir diantara mereka.²⁵

Perintah zakat berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري
 ومسلم)

²³Bustami, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Mengeah Perspektif Ekonomi Islam*, 34.

²⁴Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an," 43.

²⁵Sjechus Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV Aulia Surabaya, 2005), 251.

Artinya: “Islam itu ialah: Bahwa engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulana Ramadhan.”²⁶

Zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mekanisme subsidi ekonomi serta pemberdayaan dan pembinaan yang dapat menekankan jumlah masyarakat ekonomi lemah atau miskin. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal negara yang memiliki posisi penting dan juga dipandang sebagai salah satu tatanan sosial ekonomi yang adil untuk membangun masyarakat sejahtera.²⁷

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki corak sosial ekonomi dan merupakan komponen penting dalam sistem ekonomi berdasarkan syarat Islam. Zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi vertikal (*hablum minallah*) juga memiliki dimensi horizontal (*hablum minannas*) serta mampu menyentuh wilayah moral, sosial, dan ekonomi, karena zakat diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Menurut Wulansari dan Setiawan dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup. Dalam hal ini maksud dan tujuan zakat sama seperti halnya dengan tujuan dari adanya pemberdayaan yang tidak lain juga berupaya untuk

²⁶Zarkasih, *Analisi Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Pekalongan: NEM-Anggota IKAPI, 2021), 1.

²⁷Ibid., 2.

meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan.²⁸

Adapun mekanisme pendistribusian harta zakat kepada *mustahik* dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, zakat konsumtif dan zakat produktif. Hal ini karena pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis dalam artian lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat.²⁹

Penyaluran zakat secara konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang hanya sekali atau sesaat saja. Penyaluran ini tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahiq*. Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif ini adalah pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.³⁰

Pendayagunaan zakat produktif sejatinya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, minimnya modal kerja dan kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan adanya masalah tersebut, bahwasanya zakat produktif lah yang lebih perlu untuk

²⁸Agus Arwani dkk, *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat masa Pandemi melalui Distribusi Zakat Produktif* (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2020), 3.

²⁹Ibid., 228.

³⁰Ibid., 229.

dikembangkan dengan menciptakan perencanaan-perencanaan yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendayagunaan demi terwujudnya keberhasilan. Hal ini karena zakat produktif lebih berorientasi pada pemberdayaan *mustahiq* untuk mampu meningkatkan taraf hidup melalui usaha produktif. Program zakat produktif ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di masyarakat apabila pengolaan zakat dapat dilakukan dengan strategis dan sebaik mungkin³¹

Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat. Adanya penciptaan strategi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan senantiasa meningkatkan usaha para *mustahik* dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna.³² Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan diantaranya:

- d. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk *mustahik* yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah pajak sawah dll) yang membutuhkan modal.
- e. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui *workshop* atau training kepada *mustahik* yang masih produktif.
- f. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk *mustahik* yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.

³¹Ibid., 230.

³²Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Journal Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 1, (2015), 8.

- g. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi *mustahik* yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.



BAB III

KEGIATAN PEMBERDAYAAN PKL

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo, dulunya jalan ini dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta yang dimulai dari pertigaan Ngepos Karang Patihan sampai di perempatan pabrik es Keniten. Tetapi dimasa kepemimpinann Bupati Ponorogo Bapak Ipong Muchlissoni pada tahun 2019 Jalan Soekarno Hatta yang dimulai dari per empatan pasar legi ke arah selatan sampai per tigaan Ngepos diganti namanya menjadi Jalan Hos Cokroaminoto.

Dengan berjalanya waktu jalan ini terus mengalami perubahan dari segi bangunanya mulai dari pelebaran trotoar serta adanya penambahan *accecories* yang memperindah dan mempercantik kota disepanjang jalanya. Jalan ini juga dikenal dengan banyaknya PKL yang melakukan aktivitas berjualan di sepanjang trotoar. PKL tersebut memang telah lama melakukan aktivitas di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo. PKL yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto ini berjumlah 54 PKL yang selama ini menghuninya. Dengan rincian 50 PKL yang masih aktif berjualan dan 4 PKL lainnya tidak aktif. Berikut data nama-nama dari PKL yang aktif maupun tidak aktif.¹

¹ Sudarno, *Wawancara*, 3 Juli 2022.

Tabel 3.1
Nama Pedagang yang Aktif

No	Nama Pedagang (Aktif)	Jenis Dagangan	Alamat
1.	Tukari	Angkringan	Sambi lawang Bungkal
2.	Fahmi Ahmad	Angkringan	Jl.Pahlawan 39 Ponorogo
3.	Desy Erviyanti	Penyetan	Perumahan Griyo Harmoni Banyudono
4.	Dian Setio	Kebab	Krajan,Kedungbanteng Sukerojo
5.	Heri Susanto	Angkringan	Jl. Di Panjaitan 103
6.	Hariyono	Angkringan	Jl. Bhayangkara I/ 14 A Mangkujayan
7.	Suradi	Putu	Jl. Pepaya, Rt 3/Rw 3 Keniten Ponorogo
8.	Sri Endang	Kios Rokok	Banowati Gg. I
9.	Ndaru Prasetyo	Angkringan	Jl. Argopuro 44
10.	Mustakrip	Singkong Keju	Dkh. Turi I Rt 2/Rw 1, Turi, Jetis
11.	Karyanto	Ayam Chrispy	Dkh. Krajan Rt 2 Rw 4 Ngrayun
12.	Vidi Agus	Angkringan	Jl. Sumatra 47 Ponorogo
13.	Wahyani	Tahu Tek	Pakis Baru, Nawangan Pacitan
14.	Pelni Efendi	Jam, Kaca Mata	Jl. Ontorejo 7 A Ponorogo
15.	Suwarni	Warung Kopi	Jl. Seram 27 Banyudono
16.	Lita	Roti Bakar	Jl. Astrokoro
17.	Hanif	Roti Bakar	Ahmad Dahlan 3 Tanjung Mas Rejo, Mesuji Lampung
18.	Heru Sasono	Nasi Pecel	Jl. Soroito 17 A, Kepatihan
19.	Budi Hastuti	Nasi Pecel	Jl. Soroito 17 A, Kepatihan
20.	Efendi	Martabak	Dsn Krajan Rt 2/Rw 2 Kaliwunggu Ngunut tulungagung
21.	Nanang	Singkong Keju	Jl. JA. Suprpto Gg. II/II Ponorogo
22.	Rudi	Soto	Dkh Tular 001/002 Sukosari Babadan
23.	Supriyadi	Angkringan	Jl. Soekarno Hatta Gg. I/11 Ponorogo
24.	Slamet	Soto	Jl. Soekarno Hatta Gg. I/11 Ponorogo

No	Nama Pedagang (Aktif)	Jenis Dagangan	Alamat
25.	Yusna Angga	Angkringan	Jl. Dieng 4
26.	Tegar	Nasi Pecel	Jl. Walisongo Rt 2/Rw 1 Kauman Kec. Kauman
27.	Wagiyem	Rokok	Jl. Ramawijaya 1/311 Surodikraman
28.	Mujidjiati	Rokok, Minuman	Jl. Anjasmoro 48
29.	Sudarno	Gorengan	Jl. Anjasmoro 6 Ponorogo
30.	Imron	Sayur	Jl. Soekarno Hatta 60 B
31.	Nanik	Kripik Singkong	Jl. Ternate 61 C Ponorogo
32.	Awiet	Angkringan	Jl. Dieng 10
33.	Agus	Kripik Singkong	Jl. Imam Bonjol V/60 Ponorogo
34.	Sugiman	Es Degan	Jl. Anjasmoro 01 Ponorogo
35.	Agus Wahyudi	Angkringan	Jl. Sekar Gayam Rt 2/Rw 2 Siman
36.	Ticha	Sate Ayam	Dkh. Gontor II Rt 2/Rw 1, Gontor Mlarak
37.	Sulistyono	Jam, Kaca Mata	Jl. Soroito 8 A Kepatihan Ponorogo
38.	Hermawan	Jus Buah	Perum Kertosari Indah Blok L-14 Babadan
39.	Muji	Kripik Singkong	Jl. Albasariyah, Rt 4/Rw Lengkong Sukorejo
40.	Siti Sukma	Pentol Corah	Jl. Nawangsari Rt 1/Rw 3 Singosren Jenangan
41.	Muhammad	Cemoe	Jl. Nawangsari Rt 1/Rw 3 Singosren Jenangan
42.	Boinem	Putu	JL. Manggis 35 Ponorogo
43.	Tumiran	Martabak	JL. Manggis 37 Ponorogo
44.	Misnan	Chicken	Jl. Tranjang Rt 2/Rw 2 Siman
45.	Erna	Nasi Pecel	Jl. Pahlawan 41A Ponorogo
46.	Yuri Eko	Jus, Chicken	Jl. Salak 40 B Keniten Ponorogo
47.	Iswari	Kios	Jl. Ternate 49 Ponorogo
48.	Mujiono	Kacamata, Jam	Jl. Lurung Tengah Tajuk
49.	Sefriyanto	Cincau	Jl. Ramawijaya No 27
50.	Emi S.	Jus, Sosis	JL. Pondok Raya X/16B Mampung Prapatan Jaksel

Sumber: Data PKL Jalan Hos Cokroaminoto, 2022

Tabel 3.2
Daftar Nama Pedagang yang Tidak Aktif

No	Nama Pedagang (Tidak Aktif)	Jenis Dagangan	Alamat
1.	Nanang	Gorengan	Pilangsari
2.	Hamid	Angkringan	Jl. Subali Gg. 1 / 23 A Surodikraman
3.	Heru	Molen	Dkh. Krajan 01/02 Sragi Sukorejo
4.	Kateno	Serabi Solo	Dkh. Ngrukem III Rt 2/ Rw 1, Mlarak

Sumber: Data PKL Jalan Hos Cokroaminoto, 2022

Jenis usaha PKL yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto ini kebanyakan menawarkan kuliner yang beranaka macam mulai dari makanan maupun minuman. Kurang lebih terdapat 19 macam kuliner yang ditawarkan dan terdapat satu PKL yang menawarkan usaha jasa. Berikut beberapa pengelompokan dalam bidang usaha yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto,²

Tabel 3.3
Jenis Usaha Kuliner

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Angkringan	10
2.	Penyetan	1
3.	Nasi Pecel	4
4.	Singkong Keju	2
5.	Minuman	6
6.	Kebab	1
7.	Gorengan	2
8.	Putu	2
9.	Ayam Chrispy	1
10.	Tahu Tek	1
11.	Roti Bakar	2
12.	Soto	2
13.	Sayur	1
14.	Sate Ayam	1

² Sudarno, Wawancara, 3 Juli 2022.

No	Jenis Usaha	Jumlah
15.	Pentol Corah	1
16.	Chicken	2
17.	Kripik Singkong	3
18.	Martabak	2
19.	Kios Rokok	5
Jumlah		48

Tabel 3.4
Jenis Usaha Jasa

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Jasa Jam Tangan	2
Jumlah		2

Sumber : Laporan Hasil Pendataan PKL oleh Ketua Paguyuban.

Namun walaupun begitu, tidak lah mudah bagi PKL untuk mempertahankan keberadaanya dalam rangka berjualan disepanjang trotoar Jalan tersebut. Bahwasanya pernah terdapat kabar penggusuran PKL, dengan alasan dinilai merusak pemandangan kota, sehingga dari hal ini PKL berupaya mempertahankan hak-hak mereka, yaitu melakukan upaya pemberdayaan PKL. Salah satu tujuan dibentuknya pemberdayaan ini sebagai upaya kemandirian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan demi terwujudnya kesejahteraan PKL.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh PKL yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo, yaitu dengan membentuknya suatu organisasi atau perkumpulan sesama PKL. Sejarah awal terbentuknya organisasi paguyuban mekar sore tersebut dimulai pada tahun 2013 yang dilatar belakangi keinginan dan inisiatif dari PKL sendiri. Dengan alasan dibentuknya organisasi atau perkumpulan tersebut, mereka merasa memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama belum merasakan kesejahteraan dalam usahanya serta bekerja sama

untuk mempertahankan hak-hak mereka. Sehingga dengan adanya organisasi ini diharapkan agar menjadi wadah untuk saling bekerja sama dalam memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan PKL serta sebagai bentuk dalam mempertahankan keberadaan mereka apabila sewaktu-waktu terdapat hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan dalam perkembangan yang dirasakan PKL, sebelum dan sesudah dibentuknya pemberdayaan sangat lah berbeda, yaitu sesudah adanya pemberdayaan ini dapat memberikan perubahan-perubahan pada para anggota dan juga usahanya, seperti halnya dampak yang dirasakan di dalam usahanya dapat mempermudah aspek permodalan, karena adanya program-program pemberdayaan yang dilaksanakan sebagai penunjang perekonomian bagi PKL. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh anggotanya, yaitu dengan adanya pemberdayaan ini dapat menanamkan perilaku yang lebih peduli terhadap sesama manusia karena tingginya solidaritas yang terjalin antara mereka.

B. Upaya Kegiatan Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo

Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan secara mandiri melalui organisasi, kemudian pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut penjelasnya:

1. Mandiri

Kegiatan pemberdayaan secara mandiri ini dilakukan oleh PKL sendiri dan masih minim campur tangan dari pemerintah, yaitu dengan membentuk suatu organisasi perkumpulan PKL yang bersifat kekeluargaan. Berikut hasil wawancara mengenai kegiatan pemberdayaan

yang dilakukan, kapan dilaksanakannya, tujuan adanya pemberdayaan, serta program yang dijalankan.

a. Kegiatan Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo ini dengan membentuk suatu organisasi kelompok atau paguyuban yang dinamakan mekar sore. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Bapak Sudarno selaku ketua paguyuban menyatakan bahwa:

“Untuk kesejahteraan dan sebagai penguatan usaha PKL di Jalan Hos Cokroaminoto ini, kita melakukan upaya yang dilakukan dengan membentuk sebuah organisasi perkumpulan yang dinamakan paguyuban mekar sore. Kata mekar sore ini dulu diambil karena dalam pembentukan paguyuban ini dilakukan pada sore hari ya maka dari itu terinspirasi lah nama mekar sore yang sampai saat ini”.³

Selanjutnya, Bapak Sulistiyono selaku wakil paguyuban menyatakan bahwasanya:

“Dalam menguatkan silaturahmi antara kawan, teman yang ada kita membentuk suatu paguyuban yang dinamakan mekar sore. Kenapa kok dinamakan mekar sore, karena dulu kita hadirnya di waktu jam ketiga ke atas. Dengan terbentuknya paguyuban mekar sore ini menjadi awal kekompakan kita sebagai PKL disini untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berada di lapangan”.⁴

Disamping itu yang dikatakan Bapak Supriyadi selaku Humas sama dengan dua lainnya:

“Dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup PKL kita adanya pemberdayaan mbak dengan membentuk suatu kelompok atau paguyuban yang dinamai

³ Sudarno, *Wawancara*, 23 Agustus 2022.

⁴ Sulistiyono, *Wawancara*, 25 Agustus 2022.

paguyuban mekar sore. Ya harapan dengan adanya paguyuban ini untuk saling menjalin silaturahmi antar sesama PKL yang terpenting itu selebihnya apabila ada masalah yang perlu diselesaikan mengenai PKL pastinya akan mengalir dengan sendirinya untuk selalu bekerja sama membantu satu sama lain”.⁵

Adanya inisiatif dalam rencana pembentukan organisasi atau perkumpulan sesama PKL ini tidak lah mudah, banyak sekali rintangan dan hambatan yang harus dilalui, seperti halnya pengorbanan dalam keikut sertaanya berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat karena adanya berita penggusuran PKL. Hal tersebut didasari karena kegigihan serta kekompakan yang dijalin, mereka berimpian segala sesuatu yang sudah diperjuangkan harus dapat terwujud demi tercapainya keberlangsungan kesejahteraan kehidupan mereka. Dengan itu, PKL pun telah berhasil mewujudkan satu demi satu segala impiannya dengan cara bekerja sama memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul melalui organisasi atau perkumpulan ini.⁶

Berikut susunanan organisasi struktur pemberdayaan yang dilakukan oleh PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo. Berikut data dari stuktur organisasi paguyuban mekar sore.

Tabel 3.5
Struktur Organisasi Paguyuban Mekar Sore

No	Nama	Kedudukan
1.	Sudarno	Ketua Paguyuban
2.	Sulistiyono	Wakil Paguyuban
3.	Supriyadi	Humas 1
4.	Mohammad Ma'ruf	Humas 2
5.	Tukar	Humas 3

⁵ Supriyadi, *Wawancara*, 28 Agustus 2022.

⁶Mujidjiati, *Wawancara*, 22 Agustus 2022.

6.	Desi Eriyanti	Sekretaris 1
7.	Elsa	Sekretaris 2
8.	Wahyani	Bendahara 1
9.	Eva	Bendahara 2
10.	Tumiran	Penasehat
11.	Didik Hariyanto	Penasehat Hukum 1
12.	Ratih Larasati	Penasehat Hukum 2
13.	Agus Misyanto	Seksi Agama

Sumber : Wawancara Ketua Paguyuban

b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberdayaan dengan membentuk kelompok atau paguyuban yang dilakukan secara mandiri oleh PKL ini tepatnya dibentuk pada tahun 2013 hingga sampai sekarang telah berjalan selama sembilan tahun lamanya. Berikut penjelasan, Bapak Sudarno selaku ketua Paguyuban menyatakan bahwasanya:

“Paguyuban ini didirikan sembilan tahun yang lalu, berarti tahun 2013 terbentuknya hingga saat ini, alhamdulillah sudah lebih baik dari pada sebelumnya. Dalam berjalanya kegiatan paguyuban ini telah melakukan beberapa program yang dilakukan guna untuk mengembangkan organisasi yang telah dibentuk bersama-sama sesama PKL”.⁷

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Sulistiyono selaku wakil paguyuban bahwasanya:

“Paguyuban mekar sore ini dibentuknya tahun 2013 dengan anggota 54 PKL, sampai saat ini sudah berjalan 9 tahun. Setelah paguyuban mekar sore ini dibentuk beberapa tahun yang lalu akhirnya pemerintah daerah itu menghendaki supaya paguyuban PKL yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto ini menjadi satu wadah dan berjalan lah sampai saat ini”.⁸

Sama halnya yang dikatakan Bapak Supriyadi selaku humas paguyuban menyatakan:

⁷ Sudarno, *Wawancara*, 23 Agustus 2022.

⁸ Sulistiyono, *Wawancara*, 25 Agustus 2022.

“Tahun 2013 mbak paguyuban mekar sore ini dibentuk sudah lumayan lama, sekarang ya sudah ada sembilan tahunan. Dengan adanya paguyuban ini kita sebenarnya sangat bersyukur karena dapat memberikan manfaat tersendiri untuk para anggotanya. Seperti sekarang sudah ada beberapa program yang dijalankan bersama-sama, dalam hal ini salah satunya berdampak terhadap kemudahan dalam memperoleh pinjaman”.⁹

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dengan dibentuknya pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroamnoto ini yaitu sebagai penyaluran, mempererat silaturahmi antara PKL, sebagai penghubung antara PKL dengan pemerintah dalam menyalurkan pendapat, serta sebagai wadah untuk saling bekerja sama memecahkan segala permasalahan yang bersangkutan dengan PKL guna mencapai kesejahteraan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Berikut pernyataan Bapak Sudarno selaku ketua paguyuban bahwasanya:

“Kita membentuk paguyuban tujuannya untuk penyaluran, terus dengan adanya paguyuban ini dapat dijadikan silaturahmi antar pedagang yang lain, ya harapannya agar pedagang satu dengan yang lain jangan ada perang antara kita serta dengan adanya wadah ini semua permasalahan menyangkut PKL dapat dipecahkan bersama-sama dengan jalan musyawarah sehingga dengan ini keinginan yang belum terwujud dapat terpenuhi”.¹⁰

Selanjutnya Bapak Sulistiyono selaku wakil paguyuban menyatakan bahwasanya:

“Paguyuban ini dibentuk ya utamanya sebenarnya sebagai silaturahmi sesama PKL dan juga dijadikan wadah untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan di lapangan. Selain itu kita berharap dengan adanya kelompok ini dapat menjadi

⁹ Supriyadi, *Wawancara*, 28 Agustus 2022.

¹⁰ Sudarno, *Wawancara*, 23 Agustus 2022.

jembatan penghubung antara PKL dengan pemerintah dalam menyalurkan pendapat guna perbaikan PKL itu sendiri”.¹¹

Disamping itu, Bapak Supriyadi selaku humas paguyuban menyatakan bahwasanya:

“Yang mana tujuan dengan adanya paguyuban atau kelompok ini, yaitu dapat mempererat silaturahmi antar pedagang, selain itu juga dengan adanya paguyuban ini kita dapat berkumpul menjadi satu kesatuan dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan mengenai PKL salah satunya untuk mempertahankan hak-hak kita sebagai pedagang serta sebagai penguatan didalam usaha”.¹²

Dari tujuan pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto tersebut juga terdapat beberapa visi serta misi yang ingin dicapai diantaranya:¹³

1) Visi

Visi dari adanya pemberdayaan Jalan Hos Cokroaminoto ini adalah untuk membentuk suatu kelompok atau paguyuban yang digunakan sebagai wadah untuk bekerja sama dalam menuntaskan segala permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan PKL guna meningkatkan derajat kesejahteraan sosial Pedagang Kaki Lima (PKL).

2) Misi

Misi adanya pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto diantaranya sebagai berikut:

¹¹ Sulistyono, *Wawancara*, 25 Agustus 2022.

¹² Supriyadi, *Wawancara*, 28 Agustus 2022.

¹³ Sudarno, *Wawancara*, 23 Agustus 2022.

- a) Dapat terwujudnya organisasi yang adil, bermanfaat, terstruktur dan sejahtera guna mewujudkan segala impian-impian yang diharapkan.
- b) Menjadi penyambung aspirasi masyarakat ke instansi terkait segala permasalahan yang berhubungan dengan PKL.
- c) Revitalisasi memperluas dan memperkuat jaringan PKL dengan lembaga atau instansi pemerintah guna meningkatkan akses permodalan, profesionalitas, serta sumber daya.

d. Program Pemberdayaan

Terdapat beberapa Program pemberdayaan mandiri yang dilakukan oleh PKL Jalan Hos Cokroaminoto. Program-program pemberdayaan yang telah dijalankan diantaranya yaitu:

- 1) Arisan rutin yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Dalam arisan rutin ini terkadang dimanfaatkan PKL untuk berkumpul membicarakan segala permasalahan atau kendala yang ada dilapangan guna menemukan penyelesaiannya dengan cara musyawarah.
- 2) Kegiatan selanjutnya, adanya koperasi simpan pinjam, dengan adanya koperasi simpan pinjam ini dapat memberikan pinjaman sebesar 3.000.000 bagi setiap individu.
- 3) Adanya jimpitan setiap hari bagi PKL sebesar 5.000 bagi setiap individu. Dengan rincian pembagian, 2.000 untuk jimpitan, 2.000

sebagai uang iuran pembelian sarana, serta yang 1.000 diberikan kepada petugas penarik.

- 4) Dan yang terakhir ada kegiatan liburan bersama bagi PKL yang dilakuka setiap dua tahun sekali.

Berikut wawancara yang dilakukan di lapangan, Bapak Sudarno selaku ketua paguyuban menyatakan:

“Program yang telah dijalankan saat ini ya arisan rutin, terus silaturahmi, berkumpul bersama setiap satu bulan sekali sekaligus arisan, biasanya kumpulan kayak gini kita manfaatkan untuk bermusyawarah guna menyelesaikan adanya kendala di lapangan, selain itu juga kita ada koperasi simpan pinjam yang setiap peminjaman kita bisa memberikan pinjaman sebesar tiga juta setiap individu, terus ada jimpitan harian yang jumlahnya 5.000 dengan rincian 2.000 untuk kursi 2.000 lagi untuk jimpitan yang 1.000 untuk petugas penarik, tabungan suka rela, lalu tamasya ke luar kota bersama setiap dua tahun sekali”.¹⁴

Selain itu, Bapak Sulistiyono selaku wakil pemberdayaan menyatakan bahwasanya:

“Di paguyuban ini kita ada koperasi simpan pinjam milik bersama pinjamanya tiga juta per orang, ada jimpitan juga setiap harinya berjumlah 5.000 yang 2.000 nya untuk iuran kursi, 1.000 diberikan kepada petugas penarik dan 2.000 lagi untuk jimpitannya. Terus ada arisan rutin tiap bulan, kegiatan liburan bersama setiap dua tahun sekali, tabungan suka rela ya sementara masih itu saja”.¹⁵

Selanjutnya Bapak Supriyadu selaku Humas menyatakan bahwasanya:

“Ada program liburan dua tahun sekali, terus ada tabungan sukarela dan sekarang kita membentuk koperasi simpan pinjam

¹⁴ Sudarno, *Wawancara*, 23 Agustus 2022.

¹⁵ Sulistiyono, *Wawancara*, 25 Agustus 2022.

bersama tetapi belum resmi, terus ada arisan rutin setiap bulan sekali, dengan arisan kita manfaatkan untuk berkumpul guna membicarakan adanya kendala serta beberapa masukan dari PKL kita tampung terus nantinya kita selesaikan dengan musyawarah, selanjutnya ada jimpitan mbak jumlahnya 5.000 setiap hari 2.000 untuk jimpitan 2.000 lagi untuk saran, 1.000 nya lagi untuk diberikan petugas penarik”.¹⁶

Dari berbagai aspek pemberdayaan PKL secara mandiri ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya aspek kegiatan yang dilakukan hanya pembentukan kelompok paguyuban, adanya koperasi simpan pinjam, jimpitan harian, kegiatan tahunan, serta arisan rutin. Sebenarnya selain aspek diatas pemberdayaan secara mandiri dapat lebih dikembangkan seperti halnya penguatan skil serta adanya arisan rutin yang dimanfaatkan hanya digunakan sebagai musyawarah dalam penyelesaian permasalahan dapat diisi dengan banyak hal contohnya pemberdayaan *spritual* dan *workshop* pengembangan program pemberdayaan PKL.

2. Pemerintah

Sejauh ini pemerintah belum melakukan upaya pemberdayaan kepada PKL Jalan Hos Cokroaminoto. Hal ini disampaikan oleh Ibu Krisnawati perwakilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, menyatakan bahwasanya:

“Belum adanya upaya pemberdayaan sama sekali untuk PKL yang berada Jalan Hos Cokroaminoto. Dulu dalam upaya pemberdayaan PKL sudah pernah mencoba pada Jalan Sultan Agung yang ingin dipindah lokasikan di Jalan Menur tetapi nyatanya tidak berhasil karena banyaknya PKL yang memberontak pemerintah pun belum sanggup mengatasinya. Saat ini upaya yang dilakukan hanya

¹⁶Supriyadi, *Wawancara*, 28 Agustus 2022.

melakukan pembinaan saja terhadap PKL seperti halnya memberikan himbaun PKL harus rapi, bersih, dan tertib dalam melakukan usahanya”.¹⁷

Dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya pemerintah belum dapat melakukan upaya pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto dikarenakan kegagalan sebelumnya dalam mencoba pemberdayaan di lokasi lain karena ketidak sanggupannya pemerintah dalam mengatasi banyaknya PKL yang melakukan pemberontakan untuk dipindah lokasikan. Namun dalam hal lain, pemerintah juga berperan memberikan adanya kontribusi kepada PKL dengan upaya melakukan pembinaan, yaitu mengkondisikan tempat usahanya dengan cara memberikan himbauan kepada mereka terkait dengan penertiban, kerapian, dan kebersihan lokasi.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo

Faktor yang mempengaruhi adanya pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo diantaranya adalah:

1. Terbentuknya Solidaritas antara PKL

Kondisi sosial ekonomi ini merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan pemberdayaan. Berdasarkan wawancara di lapangan, Bapak Sudarno selaku ketua paguyuban menyatakan bahwasanya :

“Pemberdayaan dengan dibentuknya paguyuban mekar sore ini di latarbelakangi ingin menepis adanya hal-hal negatif dari sesama

¹⁷Krisnawati, *Wawancara*, 23 Agustus 2022.

PKL, contoh apabila dagangan yang satu laris satunya enggak nanti ada rasa iri la hal seperti ini lah yang ingin kita hindari. Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan seperti ini harapannya agar kita dapat satu seperti keluarga sendiri dengan begitukan kita merasa tidak enak apabila timbul rasa-rasa atau pikiran negatif dengan PKL lainnya. Hal lain yang melatarbelakangi ya karena kita sebagai PKL berkumpul berjualan di Jalan Hos ini yang dulu namanya masih Jalan Soekarno, merasa memiliki nasib atau keadaan yang sama, masih sulit untuk mencapai kesejahteraan ekonomi ataupun PKL yang begini-gini saja belum dapat berkembang, tidak adanya pemecahan masalah terkait PKL karena kita belum menjadi satu. Makanya kita membentuk paguyuban atau kelompok ini harapannya ya bekerjasama agar bisa berkembang”.¹⁸

Selain itu yang dikatakan Bapak Sulistiyono selaku wakil ketua paguyuban, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya:

“Inisiatif dari teman-teman PKL ingin membentuk adanya pemberdayaan karena kita merasa memiliki nasib yang sama, oleh karenanya kita bekerja sama membentuk paguyuban mekar sore agar menjadi kekuatan untuk memperkuat hak-hak kita sebagai PKL, kalau bukan kita PKL siapa lagi. Karena kita juga ingin berkembang dan dapat sejahtera”.¹⁹

Di samping itu, Bapak Supriyadi selaku Humas pemberdayaan PKL menyatakan bahwasanya:

“Hal utama membentuk paguyuban mekar sore ini ya sebenarnya untuk silaturahmi sesama PKL, namun alasan lain sebagai perkuat kedudukan PKL juga untuk berjualan disini apabila sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan kita sudah satu gitu dengan kata lain saling berkerja sama mempertahankan hak-hak kita, lagi pula kita juga sudah berjuang mendapatkan izin paguyuban sebagai kekuatan PKL. Dan dengan adanya paguyuban mekar sore ini kita mampu membuktikan bahwasanya tidak hanya dipandang sebelah mata sebagai penyebab pekumuhan kota, tetapi dengan adanya kekompakan seperti ini kita dapat maju, berkembang, serta dapat mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan adanya program-

¹⁸Sudarno, *Wawancara*, 25 Agustus 2022.

¹⁹Sulistiyono, *Wawancara*, 25 Agustus 2022.

program yang telah dijalankan dan juga dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara lapangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya faktor-faktor adanya pelaksanaan pemberdayaan PKL diantaranya:

- a. Rasa solidaritas yang tinggi atau rasa saling percaya sesama PKL. Dengan begini, maka PKL dapat menjadi satu kesatuan, dapat saling menghormati, serta tidak muncul adanya rasa untuk bersaing antara PKL satu dengan yang lainnya dalam menjalankan usahanya.
- b. Mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan antar PKL, yang akan menciptakan rasa kerukunan dan keharmonisan diantara mereka.
- c. Dengan adanya paguyuban ini akan menjadi wadah sebagai perantara penghubung antara PKL dengan pemerintah dalam menyalurkan aspirasi serta dalam mempertahankan hak-hak mereka.

2. Tidak Kepedulian Pemerintah

Ketidak pedulian pemerintah juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya pelaksanaan pemberdayaan PKL. Berikut pernyataan dari Bapak Sudarno selaku ketua paguyuban bahwasanya:

“Ya bisa dibbilang kurangnya komunikasi antara kita sebagai PKL dan pemerintah. Kalau pemerintah mau menaungi PKL kita senang pastinya, maksudnya dalam hal ini khusus bagian bidang perdakum yang seharusnya bergerak menangani PKL. Inikan awalnya masih tersekat dengan plt mau gerak kepala perdakumnya gak ada artinya tertunda, mau gerak lagi kepala perdakumnya pensiun jadi gak jadi lagi kan percuma. Pemerintah sendiri menganggap PKL lemah. Ini sudah sering terjadi padahal kita tidak bisa melihat hati seseorang,

²⁰Supriyadi, *Wawancara*, 28 Agustus 2022.

ilmu seseorang, kalau hanya melihat raut wajah rata-rata inputnya negatif. Pemerintah beranggapan Orang kayak PKL apa bisa diajak komunikasi. Kalau diajak bicara baik-baik ya bisa dan mau sebenarnya, yang pentingkan komunikasi lancar. Komunikasi dapat berjalan dengan baik insyaallah semua akan lancar karena tinggal arus komunikasinya arahnya kemana kalau tujuannya untuk PKL membangkitkan semangat ini kan artinya ada kolaboratif dengan begitu kan dapat menemukan titik terang. Oh ternyata pemerintah maunya begini dan sebagainya nanti kita sampaikan ke anggota kemauanya kan sebenarnya seperti itu ketika pas di forum jadinya enak”.²¹

Selain itu Bapak Sulistyono selaku wakil Paguyuban menyatakan bahwasanya:

“Sebenarnya gini kita sebagai masyarakat kecil itu gampang, kita mau diajak kerja sama untuk memajukan kota Ponorogo dan seadanya pemerintah membimbing kita ya kita siyap dan senang agar PKL disini lebih maju dan sejahtera. Sebenarnya sentuhan dari pemerintah sangat kita harapkan soalnya sentuhan-sentuhan dari pemerintah itu hanya retribusi yang sampai saat ini setia menemani kita. Karena kita sebagai PKL merasa belum adanya upaya pemberdayaan dari pihak yang lebih berwenang atau atasan ya kita berupaya membentuk pemberdayaan PKL sendiri ini salah satu tujuannya sebagai wadah untuk saling bekerja sama bertukar pikiran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai PKL”.²²

Di samping itu, Bapak Supriyadi selaku humas pemberdayaan menyatakan bahwasanya:

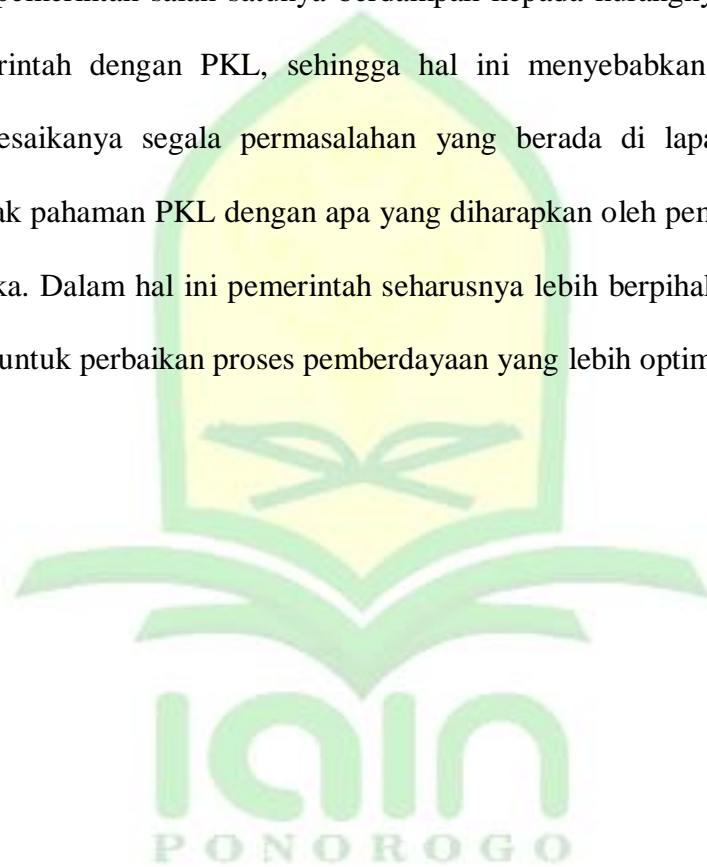
“Kita sebagai PKL disini sebenarnya tidak mau neko-neko, cukup kita mau didengar diajak bicara baik-baik kita sebenarnya menunggu dan sangat terbuka, tetapi karena kurangnya komunikasi antara kita PKL dengan pemerintahan, kita jadi tidak paham bagaimana keinginan ataupun harapan dari pemerintah untuk PKL, dengan begitukan kita bingung pastinya untuk melangkah. Oleh karenanya kita sebagai PKL membentuk pemberdayaan ini salah tujuannya ya agar menjadi jalur untuk kita saling berkumpul jadi satu ingin bermusyawarah memecahkan masalah”.²³

²¹Sudarno, *Wawancara*, 25 Agustus 2022.

²²Sulistyono, *Wawancara*, 25 Agustus 2022.

²³Supriyadi, *Wawancara*, 28 Agustus 2022.

Berdasarkan kesimpulan kutipan diatas dapat diketahui bahwasanya ketidak pedulian pemerintah menjadi faktor adanya pelaksanaan pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo. Kondisi PKL dibiarkan apa adanya tanpa pelatihan maupun penyuluhan. Seperti adanya pembiaran, pemerintah belum mengupayakan secara maksimal. pembiaran oleh pemerintah salah satunya berdampak kepada kurangnya komunikasi pemerintah dengan PKL, sehingga hal ini menyebabkan belum dapat terselesaikanya segala permasalahan yang berada di lapangan, karena ketidak pahaman PKL dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk mereka. Dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada PKL guna untuk perbaikan proses pemberdayaan yang lebih optimal.



BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

A. Kegiatan Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo

1. Kegiatan Mandiri

Pemberdayaan yaitu serangkaian kegiatan usaha sebagai upaya dalam memperkuat kekuasaan suatu kelompok yang lemah di masyarakat serta individu yang masih berada di garis kemiskinan. Pendapat lain mengatakan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memajukan tingkat organisasi maupun individu, dengan manajemen yang cocok terkait usaha yang hendak diberdayakan.¹

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dilakukan secara mandiri. Kemandirian disini yaitu suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul demi tercapainya suatu tujuan, tanpa menutup diri dari berbagai kemungkinan kerjasama atau gotong-royong dalam hal yang saling menguntungkan. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan mandiri ini dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan perekonomian PKL, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan ekonomi masyarakat bertujuan agar masyarakat lebih mandiri, dalam hal ini merupakan bentuk upaya untuk

¹Zelin Dinda Pratiwi, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 60.

menciptakan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.²

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara mandiri merupakan implementasikan prinsip *ta'awun*. *At-Ta'awun* merupakan sendi utama didalam tata kehidupan masyarakat, bahwasanya masyarakat tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. *Ta'awun* merupakan sesuatu yang dapat menumbuhkan adanya rasa tolong-menolong, gotong-royong, serta kesetiakawan didalam kebaikan dan taqwa. *Ta'awun* juga mengandung arti timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karenanya sikap *ta'awun* mendorong atau mendukung setiap orang untuk selalu berusaha serta bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain maupun kepentingan bersama.³

Konsep *Ta'awun* sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوَنُ

Yang Artinya: “Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa serta janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan juga permusuhan”⁴

Menurut Hamka, *ta'awun* merupakan sikap tolong-menolong dan sikap saling bantu-membantu. Dalam tafsirnya dijelaskan, bahwasanya

² Sri Vandayuli Riorini, Peningkatan *Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 di Tengah Pandemi* (Cirebon: INSANIA, 2019), 43.

³Wahyu Egi Widayat dkk, Penguatan Aswaja Annahdliyah (Semarang: CV.Pilar Nusantara, 2019) 35.

⁴Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2.

diperintahkan hidup untuk saling tolong-menolong dalam membina *Ar-Birru*, yaitu segala ragam dan berbagai maksud baik serta berfaedah, yang didasarkan dalam menegakan taqwa, yaitu mempererat hubungannya dengan Tuhan. “*Janganlah tolong-menolong atas berbuat dosa dan menimbulkan adanya permusuhan serta menyakiti sesamanya*”. Sedangkan Qardhawi menyebut *ta’awun* sama dengan takaful yang artinya kesetiakawanan. Islam selalu mengajarkan untuk saling menjalin hubungan kesetiakwanan dan kerjasama didalam masyarakat sepanjang hal tersebut berkaitan dengan kemasyarakatan, muamalah, maupun perkara-perkara sosial. Sehingga *ta’awun* ini dapat dilakukan dengan apa, dan siapa saja tanpa adanya aturan persyaratan. Semua dapat mengerjakannya, baik yang tua maupun muda hingga yang masih kecil, sepanjang didalam hal kebaikan serta kebajikan.⁵

Prinsip *ta’awun* ini merupakan prinsip utama didalam pemberdayaan, karena pada dasarnya program pemberdayaan itu, merupakan upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga bimbingan. Upaya pemberdayaan sendiri harus dimulai dengan adanya rasa kepedulian sesama dan niat menolong sesama individu maupun masyarakat. Hal ini berasal dari adanya rasa persaudaraan yang dapat tumbuh dari ikatan *ukhuwwah*.⁶ Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto benar-benar mencerminkan adanya prinsip

⁵Muh. Naim Madjid, “Membangun Ekonomi Kreatif Warga Desa Lencoh Melalui Produksi Sistik Berbasis Ta’awun dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Covid-19 ekonomi, ed. Muh. Naim (Yogyakarta: UMY, 2021), 141.

⁶Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an,” 35.

ta'awun. Pemberdayaan yang dilakukan yaitu membentuk suatu organisasi paguyuban yang bernama mekar sore dengan melibatkan hampir seluruh anggota. Dibentuknya organisasi ini, yaitu adanya persamaan nasib sesama PKL, sehingga timbulah rasa persaudaraan antara satu sama lain. Sedangkan tujuan dilaksanakan pemberdayaan untuk memupuk rasa solidaritas yang tinggi dan keharmonisan antar PKL untuk menghindari persaingan yang negatif guna bekerja sama dalam melakukan perubahan dalam kebaikan, yaitu mencapai kesejahteraan kehidupan ekonomi.

Keharmonisan merupakan suatu hal yang membuat hubungan didalam organisasi menjadi lebih baik antar anggota serta akan tercapainya kerjasama yang baik pula, karena aspek keharmonisan sendiri, yaitu terjalinnya kasih sayang antar sesama anggota, saling pengertian, serta adanya komunikasi yang terjalin secara efektif.⁷ Keharmonisan didalam suatu organisasi akan berpengaruh salah satunya terhadap perbaikan komunikasi antar setiap anggota, dengan adanya komunikasi yang baik akan mencapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efisien.⁸ Komunikasi didalam organisasi paguyuban mekar sore ini terjalin baik, karena keterbukaan setiap anggota dalam bermusyawarah menyelesaikan berbagai masalah serta adanya rasa pengertian setiap anggota organisasi dengan selalu menghargai dan menghormati perbedaan

⁷Asep Anshorie, "Peranan Komunikasi Kelompok dalam Menciptakan Keharmonisan Antar Anggota Komunitas Pengajian Barokah Sekumpul Mushola Ar-Raudah Loa Bakung Samarinda," *Journal Komunikasi*, Volume 3, No 4, (2015), 368.

⁸Nana Triapnita Nainggolan dkk, *Komunikasi Organisasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 3.

pendapat. Dengan begini akan mempermudah berjalanya segala kegiatan yang dibentuk serta menambah kekompakan dalam mencapai dan mewujudkan tujuan bersama yang diharapkan.

Sedangkan prinsip ta'awun yang dilihat dari segi usaha, merupakan bentuk hubungan saling tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan bersama.⁹ Hal tersebut dapat diwujudkan dengan jalan melakukan perluasan jaringan usaha dengan pihak-pihak lain. Jaringan usaha sendiri merupakan sebuah proses membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pengusaha lain atau calon pelanggan. Jaringan usaha merupakan tindakan yang sangat perlu dilakukan, karena pada prinsipnya usaha bukanlah persaingan, tetapi saling membantu. Dengan adanya jaringan usaha, PKL akan memiliki kesempatan untuk memperluas usahanya sehingga akan memberikan banyak keuntungan terhadap kelangsungan usahanya kedepan.¹⁰

Dalam pengertian lain, jaringan usaha adalah kerja sama usaha, akses dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga (perusahaan lain, lembaga keuangan, lembaga lainnya) yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, sehingga produktivitas dan daya saing yang tinggi dapat dicapai oleh perusahaan yang pada akhirnya perusahaan akan mendapat profit serta perkembangan usaha seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Prabatmodjo Jaringan

⁹ Ernie Tisnawati Sule dkk, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 39.

¹⁰ Dewi Suryani Purba dkk, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 145.

usaha diartikan sebagai suatu bentuk organisasi di bidang ekonomi yang dimanfaatkan untuk mengatur koordinasi serta mewujudkan kerjasama antar unsur didalam organisasi. Organisasi yang dimaksud dapat bersifat formal maupun informal.¹¹

Kegiatan pemberdayaan mandiri PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo yang dilakukan dengan membentuk paguyuban ini semata-mata hanya berorientasi didalam organisasi tersebut tanpa adanya perluasan jaringan usaha terhadap pihak lain. Jaringan usaha sendiri sebenarnya sebagai salah satu faktor penting didalam usaha untuk meningkatkan skala ekonomi, pengelolaan usaha yang lebih efisien dan memperluas pangsa pasar. PKL yang memiliki jaringan usaha yang kuat akan menjadi modal untuk dapat melaksanakan kegiatan operasinya secara efektif dan efisien, sehingga jaringan usaha juga dapat menjadi modal daya saing perusahaan.¹²

Dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PKL Jalan Hos Cokroaminoto, yaitu dibentuknya program-program kegiatan. Kegiatan ini dibentuk salah satunya bertujuan sebagai penguatan ekonomi PKL dari segi permodalan usaha. Modal usaha juga menjadi aspek yang paling penting dalam usaha. Oleh karenanya peningkatan

¹¹ Ibid., 146.

¹² Dandan Irawan, "Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Journal Ilmiah Manajemen*, Volume x1, Nomor 2, 103.

ekonomi dalam aspek permodalan ini penting guna sebagai upaya dalam mempermudah memperoleh pemasukan untuk menjalankan usahanya.¹³

Berikut beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh paguyuban mekar sore dalam penguatan ekonominya:

- a. Kegiatan arisan. Dengan kegiatan ini dapat menjadi sarana yang menyediakan dana untuk mempermudah masyarakat akan kebutuhannya. Sedangkan jika ditinjau dari segi sosialnya arisan dapat menumbuhkan adanya rasa tolong menolong di dalam masyarakat yang terlibat pada kegiatan tersebut.¹⁴ Kegiatan arisan rutin yang dilakukan oleh anggota paguyuban ini dilakukan setiap satu bulan sekali. Dalam kegiatan ini dimanfaatkan PKL untuk bermusyawarah membahas berbagai permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Dengan adanya arisan rutin yang hanya dimanfaatkan sebagai bermusyawarah, sebenarnya dapat diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan. (kurang teori)
- b. Koperasi simpan pinjam khusus untuk anggota paguyuban. Koperasi ini sebagai pemupukan simpanan dari anggotanya untuk dipinjamkan sebagai modal usaha atau sebagai pemenuhan kebutuhan lainnya.¹⁵ Koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh paguyuban mekar sore ini merupakan salah satu usaha paguyuban yang dilakukan dalam

¹³Sari Juliasty, *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha* (Jakarta: PT Persero Balai Pustaka, 2009), 4.

¹⁴Anugerah Dwi Ananda, dkk, "Arisan Rumah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Journal Pendidikan Sosiologi*, Volume 8, No 3, (2019) 3.

¹⁵Asep Saeful Falah, *Monograf Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Koperasai Pedagang Pasar* (Surabaya: CV Global Aksara Pers, 2022), 2.

mensejahterakan anggotanya, yaitu dengan cara meminjamkan dana atau modal bagi anggota yang membutuhkan. Sedangkan dana koperasi diperoleh dari para anggotanya sendiri dengan peminjaman setiap anggota sebesar Rp. 3.000.000. Adanya Koperasi simpan pinjam sendiri merupakan tonggak dari ekonomi kerakyatan karena sifatnya yang gotong-royong serta kekeluargaan, apalagi dikelola sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tujuan dengan adanya koperasi simpan pinjam oleh paguyuban mekar sore ini yaitu, untuk mencapai kesejahteraan bersama salah satunya dalam memperoleh modal untuk keberlangsungan usahanya agar tercapainya kehidupan ekonomi yang lebih baik.

- c. Jimpitan harian. Jimpitan sendiri merupakan upaya yang dilakukan dalam memperoleh modal untuk kegiatan masyarakat seperti iuran lampu jalan, iuran sampah, dan lain sebagainya.¹⁶ Kegiatan jimpitan yang dilakukan oleh paguyuban mekar sore ini bertujuan sebagai adanya pengadaan modal yang diperoleh dari para anggota setiap harinya guna untuk menunjang berjalanya kegiatan pemberdayaan. Jimpitan yang diberlakukan sebesar lima ribu bagi setiap anggota, dengan rincian dua ribu digunakan sebagai iuran pembelian sarana, dua ribu lagi sebagai tabungan atau kas, dan seribunya diberikan kepada petugas penarik.

¹⁶Muhammad Hasyim dkk, "Pelestarian Tradisi Uang Jimpitan di Lingkungan Dusun Ngepuh Lor, Desa Banyusidi, Pakis, Magelang, Jawa Tengah," *Journal Inovasi dan Kewirausahaan*, Volume 3, No 3, (2014), 151.

d. Kegiatan tahunan yang diadakan oleh anggota paguyuban yaitu adanya liburan bersama. Dengan adanya kegiatan liburan bersama ini memiliki banyak manfaat bagi pikiran dalam meningkatkan kinerja seseorang, seperti halnya dapat dengan cepat menciptakan ide-ide, solusi, serta timbulnya motivasi dalam kerja sehingga akan menambah semangat dalam pekerjaan. Selain berdampak positif terhadap pikiran, liburan juga dapat bermanfaat dalam meningkatkan kerja sama serta kemampuan dalam berorganisasi.¹⁷ Kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh paguyuban mekar sore ini diharapkan agar berdampak positif terhadap kebersamaan dalam menambah kekompakan menjalankan berbagai kegiatan yang ada didalam organisasi, mencegah adanya perselisihan, karena dengan begini sesama anggota akan semakin dekat serta akan semakin menganal atau pun mengerti satu sama lain. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan rasa kekeluargaan setiap anggota.

Dari berbagai program kegiatan pemberdayaan PKL yang telah dilaksanakan, bahwasanya program kegiatan yang bertujuan sebagai penguatan ekonomi, dapat dipahami hanya berorientasi terhadap penguatan dalam aspek duniawinya saja, sebenarnya dalam berbagai kegiatan program pemberdayaan ini dapat diisi dengan ilmu-ilmu keagamaan, seperti halnya pemberdayaan dalam aspek spiritual, sehingga dapat menyeimbangkan pemberdayaan didalam mencapai kesejahteraan,

¹⁷Siti Nurfitriya, "Hubungan Antara Rekreasi di Akhir Pekan dengan Motivasi Kerja Karyawan FISIB Universitas Trunojoyo Madura," *Journal Personifikasi*, Volume 2, No 2, (2011), 92.

tidak hanya pada duniawi saja melainkan ukhrawinya. Hal ini disebabkan karena agama mempunyai kedudukan serta peran yang sangat penting dan strategis salah satunya dalam penguatan ekonomi, utamanya sebagai landasana spiritual, moral, dan juga etika dalam pembangunan. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dapat dipahami lalu diamankan oleh individu maupun masyarakat. Sehingga agama sering ditandai sebagai pemersatu aspirasi setiap manusia paling *sublime*, sebagai sumber tatanan di masyarakat, sumber moralitas, dan perdamain batin setiap individu yang menyebabkan setiap manusia menjadi lebih beradab. Maka dari itu, adanya pembangunan agama perlu mendapat perhatian yang lebih serius, baik yang berkaitan dengan pendidikan agama, penghayatan serta pengamalan agama, serta pemberdayaan keagamaan dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat.¹⁸

Islam merupakan sebuah agama yang sempurna dalam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan juga alam semesta. Berbagai kegiatan ekonomi manusia diatur didalam Islam menggunakan prinsip *ilahiah*. Harta yang ada pada diri manusia, sesungguhnya hanya titipan dari Allah Swt. Agar harta itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi kepentingan seluruh umat manusia yang pada akhirnya pun semua akan kembali kepada Allah, untuk dipertanggung jawabkan.¹⁹

¹⁸Moch. Khoirul Anwar, "Penguatan Ekonomi Umat Melalui Lembaga Keagamaan," *Jurnal el-Qist*, Volume 01, No 01, (2011), 6.

¹⁹Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics dan Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 20120), 1.

Dalam memperkuat adanya sistem ekonomi Islam, paling tidaknya terdapat tiga langkah strategis yang dapat dilakukan oleh kaum Muslim secara bersama-sama, baik itu para alim ulama, para tokoh-tokoh, serta masyarakat luas. Pertama, yaitu didalam ilmu ekonomi Islam dapat mengembangkan melalui dunia pendidikan formal atau pun nonformal, baik itu di instansi kampus, kelompok kajian, lembaga penelitian ilmiah, pondok pesantren, dan sebagainya. Kedua, dikembangkannya berbagai regulisasi yang dapat mendukung penguatan ekonomi Islam dalam praktik, baik itu didalam institusi keuangan, melalui kegiatan bisnis serta usaha riil. Dan yang ketiga, apabila suatu ekonomi Islam dapat dikembangkan serta didukung sebuah sistem yang baik, yang terpenting adalah membangun perekonomian umat secara nyata, sehingga dengan begini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dalam bentuk pengembangan sektor riil dengan ditopangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah atau Islam. Pada akhirnya dari adanya berbagai strategi atau langkah-langkah tersebut akan dapat berkembang dari ekonomi alternatif menjadi satu-satunya ekonomi yang mampu mensejahterakan umat (masyarakat), di kehidupan sekarang dan masa mendatang.²⁰

2. Dukungan Pemerintah

Selanjutnya, pemberdayaan yang dilakukan oleh PKL Jalan Hos Cokroaminoto secara mandiri ini belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah atau belum optimal, karena belum ada kebijakan dari

²⁰Ibid., 156.

pemerintah yang dinilai berpihak terhadap PKL. Walaupun, dalam hal ini pemerintah sudah mengupayakan adanya dukungan kepada PKL, yaitu dengan adanya pembinaan, seperti halnya memberikan himbaun PKL harus rapi, bersih, dan tertib dalam melakukan usahanya. Kehadiran pemerintah dimaksudkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah berkewajiban melayani masyarakat demi meningkatnya taraf kehidupan yang lebih baik. Sejarah pun telah membuktikan, bahwasanya masyarakat selalu membutuhkan adanya layanan dari pemerintah, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekali pun.²¹ Oleh karenanya, sentuhan-sentuhan dari pemerintah didalam berjalanya kegiatan pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto ini sangat diharapkan, seharusnya pemerintah dapat lebih jauh lagi membantu dalam proses pemberdayaan. Karena terdapat tiga tahapan pemberdayaan yang dapat dilakukan, pertama Inisial: dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat, kedua emansipatori: dari rakyat, oleh rakyat, lalu untuk rakyat, dan didukung pemerintah bersama dengan rakyat, ketiga: partisipatoris: dari pemerintah bersama dengan masyarakat, oleh pemerintah bersama dengan masyarakat, dan untuk masyarakat.²²

Fungsi pemerintah didalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kepada kemandirian dan pembangunan agar terciptanya kehidupan yang lebih makmur. Hal ini membuktikan, bahwasanya

²¹ Nainggolan dkk, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 17.

²²Mawa'izh, "Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Journal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Volume 8, No 1, (2017), 2.

pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan begitu saja terhadap masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan optimal serta mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik lagi apabila peran pemerintah juga dapat terlibat secara optimal dan mendalam.²³ Oleh karena itu, dalam berjalanya pemberdayaan yang lebih optimal pemerintah harus lebih peduli dan berpihak dalam pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto, seperti halnya memberikan dukungan terhadap adanya, bimbingan permodalan, pelatihan serta berbagai upaya yang dapat membantu dalam kemajuan kegiatan pemberdayaan.

Dalam Islam pemerintah memiliki peran serta fungsi yakni sebagai *khalifah fi al-'ard* yang bertugas memimpin dan memakmurkan bumi. Tugas serta tanggung jawab yang harus dilakukan seorang khalifah ini memang bukanlah tugas yang ringan. Akan tetapi, apabila sebelumnya manusia telah membekali dirinya dengan iman yang kuat, ilmu dan juga keahlian yang cukup pastinya segala tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.²⁴ Sedangkan untuk mengfungsikan kekhalifahannya Tuhan telah membekali dengan potensi intelektual serta potensi spiritual.²⁵ Khalifah merupakan manusia yang mewakili umat dalam menjalankan sebuah pemerintahan, kekuasaan, serta berbagai penerapan hukum syariah. Khalifah juga sebagai wakil umat dalam mengatur kehidupan dimuka

²³Ibid., 118.

²⁴Muhamad Iqbal, "Mewujudkan Kesadaran Energi Melalui Konsep *Khalifah Fi al-'Ard*," *Journal penelitian*, Volume 13, No 2, (2016), 199.

²⁵Watsiqotul dkk, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam," *Journal Penelitian*, volume 12, No 2, (2018), 360.

bumi ini, seperti firman Allah yang tercantum didalam QS. An-Nur [24] : 55.²⁶

Ibnu Khaldun didalam bukunya *Muqadimmah*, banyak berbicara mengenai *khalifah*, “*khalifah* dan *imamah* (kepemimpinan)”. Dia menarik teorinya tentang *khalifah* dari al-Qur’an. Dalam penjelasannya, antara lain mengatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan alami untuk memimpin karena mereka diciptakan sebagai *khalifah* Allah di muka bumi. Menurut Ibnu Khaldun, *khilafah* adalah kepemimpinan. “*Khilafah* berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan”. Jika *khalifah* masih bersifat pribadi, pemerintahan adalah kepemimpinan yang telah melembaga di dalam suatu sistem kedaulatan.²⁷

Pemimpin dan kepemimpinan didalam Islam punya rujukan *naqliyah*, artinya terdapat isyarat-isyarat Al-Qur’an yang memperkuatperlu serta pentingnya kepemimpinan dalam sistem sosial. Dalam kepemimpinan ini ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Al-Qur’an mengemukakan tentang prinsip dasar kepemimpinan seperti keadilan dan amanah sebagaimana yang tersirat didalam tafsir QS. An-Nisa ayat 58 dan *munasabahnya*.²⁸

Dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto yang dilakukan secara mandiri oleh PKL Jalan Hos Cokroaminoto, dipahami dan dimaknai

²⁶Ibid., 361.

²⁷Srifariyati, “Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS.An-Nisa: 58-59,” *Journal Madaniyah*, Volume 9, No 1, (2019), 47.

²⁸Ibid., 48.

hanya sebagai pemberdayaan yang berorientasi terhadap kepentingan dunianya saja. Bahwasanya dalam teori Islam dijelaskan pentingnya pemberdayaan yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan juga ukhrawinya, dengan tujuan tercapainya kemaslahatan didalam terciptanya masyarakat yang berkualitas, berakhal dan beradab.

Sedangkan bagi pemerintah, didalam teori Islam dijelaskan, bahwasanya pentingnya khalifah (pemerintah) sebagai wakil umat dimuka bumi ini agar mengfungsikan kekhalifahannya dengan cara berpegang teguh terhadap syariat Islam agar dapat terlaksananya berbagai tugas dengan baik, salah satunya dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Karena apabila peran pemerintah dapat terealisasi dengan baik, maka pemberdayaan masyarakat pun dapat terlaksana secara optimal serta mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik lagi.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo.

Menurut Makmur dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program pemberdayaan. Sedangkan menurut Marilee S. Grindle, tugas dari pelaksanaan pemberdayaan yaitu membentuk kaitan yang dapat memudahkan adanya tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan atau dapat mencapai sesuatu yang diharapkan sebagai dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, tugas pelaksanaan memuat terbentuknya “sistem penyampaian penerusan kebijakan”, dimana saran-

sarana dirancang serta dijalankan dengan tujuan yang diharapkan dapat terwujud sesuai harapan.²⁹

Terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto. Namun secara signifikan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan PKL disebabkan oleh adanya solidaritas yang tinggi sesama PKL. Solidaritas sendiri secara bahasa memiliki arti kekompakan atau kesetiakawanan. Secara keseluruhan solidaritas merupakan usaha untuk membangun adanya rasa kebersamaan, kepentingan, rasa kesatuan, serta rasa simpati, sebagai salah satu kelompok anggota dari kelas yang sama atau dapat juga diartikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk untuk kepentingan bersama.³⁰ Solidaritas yang tinggi, menjadi faktor pelaksanaan pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto, yaitu adanya persamaan nasib sesama PKL yang masih sulit untuk mencapai kesejahteraan ekonomi serta sulitnya setiap individu dalam memecahkan segala permasalahan yang berada di lapangan guna sebagai kemajuan usaha. Karena hal tersebut, munculah keinginan PKL dalam memperkuat tali silaturahmi atau mempererat persaudaraan diantara mereka, dengan adanya solidaritas yang tinggi dapat menjadi kekuatan untuk bersatu saling bekerja sama dalam memudahkan menyelesaikan berbagai permasalahan

²⁹Siti Alvi Rohmatin, "Studi Eksploratif Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya," *Journal Ilmu Administrasi Agama*, Volume 4, No 3, (2016), 7.

³⁰Masrul dkk, *Pandemi COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia* (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), 171.

yang bersangkutan di lapangan, serta dengan begini dapat mewujudkan cita-cita serta tujuan yang selama ini diharapkan.

Dalam Islam, faktor solidaritas, dapat diimplementasikan terhadap istilah '*ashabiyyah*' yang berarti semangat golongan.³¹ Menurut Franz Rosenthal didalam buku munawwir Sjadzali, diartikan ke bahasa Indonesia memiliki makna rasa satu kelompok atau adanya solidaritas kelompok. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun istilah '*ashabiyyah*' yaitu, golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pun terdapatnya pertalian lain yang mempunyai arti sama. Hal ini disebabkan, adanya pertalian darah, yang pada dasarnya mempunyai sebuah kekuatan mengikat terhadap kebanyakan umat, sehingga berdampak terhadap mereka dengan ikut merasakan setiap kesakitan yang menimpa kaumnya itu, yang merupakan kesesuaian kodratnya yang tertanam pada dirinya. Dalam sejarah peradaban Islam, bahwasanya konsep ini membentuk solidaritas sesama masyarakat Islam agar saling bekerjasama serta memenuhi kewajiban bersama. Munculnya semangat ini, menjadikan atau mendorong terciptanya keselarasan sosial dan juga menjadi kekuatan dalam menopang kebangkitan serta kemajuan peradaban.³²

Dengan adanya faktor yang melatarbelakangi pemberdayaan, yaitu solidaritas tinggi sesama PKL, sehingga diantara mereka akan saling melakukan ta'aruf untuk mengenal satu sama lain. Ta'aruf dalam Islam

³¹A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 936.

³²Hana Widya, "Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun," *Journal Manthiq*, Volume 3, No 2, (2018), 12.

pun umumnya diartikan sebagai perkenalan. Ta'aruf juga dapat diartikan dengan mengenalkan diri, mengenal dengan baik, maupun berkenalan dengan orang lain. Inti dari ta'aruf adalah adanya interaksi yang dilakukan diantara dua orang atau bahkan lebih dengan disertai maksud tertentu. Jadi secara bahasa pengertian ta'aruf itu luas, salah satunya menyangkut persaudaraan dan pertemanan.³³ Karena tingginya semangat serta rasa persaudaraan yang muncul antara sesama PKL dan tingginya semangat untuk berdaya, maka dari itu, setiap anggota melakukan ta'aruf atau mengenal satu sama lain agar dapat bersatu serta lebih erat rasa persaudaraan atau pertemanan yang terjalin agar tercapainya maksud atau harapan bersama.

Selain solidaritas yang tinggi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi adanya pemberdayaan PKL yaitu ketidak pedulian pemerintah. Sebenarnya didalam pemberdayaan peran pemerintah sangat diperlukan guna dalam membantu mewujudkan kesejahteraan hidup. Untuk mencapai kehidupan yang diharapkan, mereka sesungguhnya belum mampu mandiri sepenuhnya, masih membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak lain.³⁴ Oleh karenanya, peran pemerintah dalam mendukung dan keikut sertaanya dalam kegiatan program pemberdayaan sangat dibutuhkan sebagai pengoptimalan.

Dengan adanya faktor Ketidak pedulian pemerintah ini, seperti adanya pembiaran, belum adanya pengupayaan secara maksimal dari

³³Merli Ummu Khila, *Yuk Ta'aruf* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 14.

³⁴Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 15.

pemerintah seperti halnya, pelatihan maupun bimbingan untuk PKL didalam pemberdayaan. Sebagai makhluk individual dan makhluk sosial, manusia harus mampu mengembangkan potensi-potensi dan juga kekuatan yang terdapat pada dirinya dalam rangka mengembangkan kehidupannya sebagai khalifah yang selalu bertanggung-jawab terhadap nasib dunia.³⁵

Pembiaran dari pemerintah salah satunya berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah dengan PKL. Hal itu menyebabkan belum dapat terselesaikannya permasalahan secara maksimal yang berada di lapangan, karena ketidak pahaman dari pihak PKL dengan apa yang diharapkan atau pun yang diinginkan oleh pemerintah. Menurut Zimmermann dalam Mulyana menyatakan bahwasanya dalam komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat akan memberikan dampak atau manfaat yang positif guna dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁶ Saat ini peran komunikasi memang sangat penting untuk selalu diperhatikan dalam kehumasan pemerintah agar pesan dapat diterima dengan sebaik mungkin dan dimengerti oleh masyarakat guna dapat mencapai tujuan komunikasi yang baik.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya dengan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto yang pertama yaitu adanya solidaritas yang tinggi sesama PKL. Maka dengan adanya solidaritas yang tinggi, akan dengan mudah

³⁵Uci Sanusi, *Kenali Dirimu Upaya Memahami Manusia dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 137.

³⁶Iswahyudi, "Peranan Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Pembangunan pada Kampung Insumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori," *Journal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 12, No 1, (2017), 25.

pula pencapaian terhadap tujuan pemberdayaan yang diharapkan karena dalam hal ini adanya kerja sama didalam setiap anggota.

Sedangkan faktor yang kedua yaitu ketidak pedulian pemerintah. Dalam hal ini Pembiaran dari pemerintah salah satunya berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah dengan PKL. Dalam teori dijelaskan bahwasanya, terjalinya komunikasi yang baik akan membawa kebaikan pula didalam menciptakan hubungan diantara dua belah pihak.

C. Pemberdayaan PKL dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya Islam merupakan agama pemberdayaan. Dalam Islam, pemberdayaan harus dilakukan tanpa henti. Hal ini sependapat dengan paradigma Islam sendiri, yaitu merupakan agama gerakan atau perubahan.³⁷ Dilakukanya pemberdayaan masyarakat salah satunya bertujuan untuk membentuk individu maupun masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian yang dimaksud yaitu meliputi kemandirian dalam bertidak, berpikir, serta mengendalikan apapun yang dilakukan.³⁸

Pemberdayaan masyarakat biasanya ditujukan terhadap bidang ekonomi yang berada didalam suatu wilayah tertentu. Pada bidang ekonomi, adanya pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tekanan pemberdayaan

³⁷Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 36.

³⁸Achmad Saeful, Sri Ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan dalam Islam", *Journal Syar'ie*, Volume 3, No 3, (2022), 1.

masyarakat yaitu terciptanya kesejahteraan seluruh umat manusia. Dengan adanya Kesejahteraan ini dapat bermuara pada kemashlahatan manusia.

Dalam perspektif Islam yang dikutip dari pendapat M. Quraish Sihab, bahwasanya pemberdayaan sifatnya harus *kaffah* (dapat menyeluruh), membeku dan menyentuh didalam diri manusia, dengan tujuan agar manusia dapat berubah secara utuh dari aspek-aspek yang ada, seperti halnya aspek material dan spiritualnya.³⁹ Material dan juga spritual merupakan satu kesatuan dari diri manusia yang tidak dapat terpisahkan, karena keduanya memiliki wadah yang bersamaan.

Aspek spritual berbicara tentang nilai atau kepercayaan kepada Tuhan, dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan mampu memberikan dorongan tersendiri bagi manusia untuk bergerak. Hal ini juga bersamaan dengan pendapat Christopher Dureau yang menjelaskan bahwasanya aspek spritual merupakan nilai atau gagasan terpenting dalam hidup bagi manusia serta apa yang membuat seseorang bersemangat. Dalam Isbandi Rukminto Adi juga menjelaskan, bahwasanya dorongan spritual mampu memunculkan tujuan hidup serta adanya dorongan untuk membantu sesama. Pada akhirnya akan dapat memunculkan makna yang lebih baik didalam kehidupan itu sendiri. Isbandi menunjukan, bagi individu dan kelompok didalam masyarakat ternyata tidak hanya mendasarkan diri terhadap kehidupan dunia dalam melakukan suatu tindakan. Namun, banyak juga masyarakat baik individu maupun kelompok yang

³⁹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran:Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2004), 301.

mendasarkan tindakan hidupnya dengan kehidupan didunia selanjutnya (akhirat).⁴⁰

Dari adanya beberapa pendapat tersebut dapat dipahami, aspek spiritual merupakan sesuatu yang berwujud imateri, dikarenakan berbicara mengenai nilai atau kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Islam aspek spiritual berkaitan erat dengan berbagai nilai yang dipahami bagi pemeluknya, nilai-nilai ini dapat berupa berbagai perintah atau pun larangan yang harus diimplementasikan pada kehidupan guna menciptakan kehidupan yang penuh kemaslahatan.

Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo selama ini dilakukan secara mandiri dengan membentuk kelompok atau paguyuban salah tujuannya sebagai penguatan terhadap bidang ekonomi, seperti halnya adanya upaya yang dilakukan dalam mengembangkan berbagai program kegiatan yang telah dijalankan dengan tujuan dapat memajukan usahanya guna memberikan kehidupan ekonomi yang lebih baik kedepannya. Sebenarnya pemberdayaan dalam perspektif ekonomi Islam itu, selain sebagai penguatan dalam bidang ekonomi juga dapat digunakan sebagai penguatan dalam aspek spiritual. Spritualisme merupakan kebutuhan dasar serta pencapaian tertinggi manusia didalam kehidupannya tanpa memandang asal usul atau suku. Pengertian lain, Spritualisme yaitu keyakinan manusia hubungannya dengan Tuhan, berdasarkan kepercayaan

⁴⁰Siska Devi Ratna Sari, *Fungsi Aset Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim* (Jakarta Barat: Tarebooks, 2022) 37.

dari individu masing-masing.⁴¹ Dalam Islam Spritualisme memiliki tujuan utama yaitu sebagai peningkatan kualitas iman taqwa, meningkatkan akhlaq, kualitas ibadah, serta dapat tercapainya perdamaian hakiki dan keselamatan dunia maupun akhiratnya.⁴²

Pemberdayaan secara mandiri yang dilakukan oleh PKL Jalan Hos Cokroaminoto itu sebenarnya sudah baik, namun di sisi lain, adanya peningkatan pemberdayaan, seperti halnya pemberdayaan Spritual, dengan pemberdayaan ini dapat meningkatkan berbagai aspek keilmuan yang nantinya dapat digunakan sebagai tambahan wawasan diantaranya yaitu, dapat mempertahankan dan mengembalikan keyakinan, dapat menjalin hubungan yang baik dengan Allah Swt, serta dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Selain itu, menjadi PKL yang melakukan usahanya dapat berorientasi kepada ajaran-ajaran agama yang dapat diimplementasikan pada kehidupan guna menciptakan kehidupan yang penuh kemaslahatan dan juga dapat menjadikan PKL yang penuh dengan etika tentunya berdampak kepada kebaikan kehidupan sosialnya.

Dengan adanya aspek spiritual akan memberikan adanya modal yang dapat dikonstruisikan didalam pemberdayaan masyarakat, karena apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat atas Tuhanya, serta bersedia dalam menjalankan berbagai perintahnya maupun menjauhi segala larangannya, maka masyarakat akan lebih mudah digerakan melalui nilai-nilai keagamaan. Dimana dengan adanya nilai agama Islam tidak berbicara

⁴¹K.H. Hasyim Ashari, "SPIRITUALISME DALAM ISLAM", *Journal Hukum dan Keadilan*, Volume 4, No 2, (2017), 1.

⁴²Ibid., 2.

mengenai ibadah saja, namun juga berbicara mengenai aspek-aspek kehidupan. Perintah serta larangan Allah yang terdapat didalam Al-Qur'an, memiliki pendasaran etika, yang berkaitan terhadap baik buruknya perilaku setiap manusia, dalam hal ini tentunya berdampak kepada kehidupan sosialnya.⁴³

Dalam Al-Qur'an pun dijelaskan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, bahkan Allah SWT berfirman, apabila orang yang beriman serta memiliki pengetahuan yang mendasar dan bermanfaat akan diangkat derajatnya seperti yang tertuang didalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah/58:11, berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ
 اَوْثَرُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: *Apabila dikatakan “Berdirilah Kamu”, maka berdirilah kamu, niscaya Allah SWT juga akan meninggikan orang-orang yang pandai beriman diantaramu serta orang yang dibekali ilmu pengetahuan beberapa derajat.*⁴⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah memberi perintah kepada kaum muslimin untuk senantiasa melakukan perbuatan dalam upaya memperkuat persaudaraan atau *ukhuwwah*, menumbuhkan rasa empati serta kepedulian sosial, antaranya dengan memberikan tempat pada orang lain, yang paling utama yaitu saat mencari ilmu, memberi

⁴³Siska Devi Ratna Sari, *Fungsi Aset Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim*, 38.

⁴⁴Al-Qur'an, Al-Mujadilah ayat 11.

kelapangan dalam majlis ilmu, usaha dalam mencari kebaikan, berusaha menyenangkan hati serta memberi pertolongan orang lain. Dalam surah ini juga dijelaskan Allah juga akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu dalam Islam sangat penting, karena dalam pandangan Islam ilmu merupakan suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim yang bermanfaat salah satunya sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengetahui hakekat kebenaran.⁴⁵ Dari berbagai penjelasan disamping telah dijelaskan pentingnya pengamalan adanya pembekalan ilmu spiritual, dengan begini harapan bagi PKL Jalan Hos Cokroaminoto dengan adanya pemberdayaan spiritual dapat bermanfaat serta menyadarkan masyarakat agar dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik dalam segala segi kehidupannya.

Walaupun Pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto yang dilakukan secara mandiri ini telah berjalan dan mampu memberikan perubahan bagi kemajuan usahanya, namun belum sepenuhnya. Dalam pemberdayaan ini juga belum adanya campur tangan dari pemerintah untuk terjun langsung ke lapangan dalam memberikan pelatihan maupun bimbingan guna mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan yang dijalankan. Sebenarnya dalam pemberdayaan ini sentuhan-sentuhan dari pihak atasan seperti pemerintah sangat diperlukan demi berjalanya kegiatan pemberdayaan yang lebih optimal. Karena dalam perspektif Islam, dijelaskan bahwasanya pemerintahan itu sebagai khalifah yang berarti

⁴⁵Suhardi, *Antologi PAI* (Medan: CV. Puskra Mitra Jaya, 20210), 40.

wakil, penerus, atau pun pengganti yang memegang adanya kekuasaan.⁴⁶ Maka dari itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus peduli serta mampu memberikan kebijakan yang berkaitan mengenai pemberdayaan dengan memberikan bimbingan, pelatihan, serta upaya-upaya yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan PKL.

Menurut Islam, berbagai mekanisme operasional pemerintahan dan juga ketatanegaraan mengacu terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Endang Saiffudin Anshari mengatakan, bahwasanya "Negara merupakan organisasi bangsa untuk mencapai suatu tujuan." Maka dari itu, bagi setiap orang Muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah serta mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhaanya, kesejahteraan duniawi maupun ukhrawinya, serta dapat menjadi rahmat bagi sesama manusia dan juga alam lingkungannya.⁴⁷

Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri. Manusia pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain dalam pemenuhannya. Tanpa adanya hal ini, ekstensi manusia tidak akan pernah sempurna. Ketika manusia telah mencapai organisasi masyarakat, manusia pun juga memerlukan seseorang yang mampu untuk dijadikan pemimpin, yang akan melaksanakan kewibaaan serta dapat memelihara mereka. Dengan kata lain,

⁴⁶Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan dan Konseling Islam* (Serang Banten: A-Empat, 2012), 6.

⁴⁷Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 2, No 1, (2017), 36.

diperlukanya pemimimpin yang paling kuat jabatannya serta disegani kelompoknya. Seseorang tersebut disebut dengan kepala negara atau dalam Islam bernama khilafah dan yang menjalankan, yaitu khalifah.⁴⁸ Dalam pemberdayaan PKL, walaupun dari mereka telah mampu melakukan upaya pemberdayaan secara mandiri. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pencapaian pemberdayaan yang lebih maksimal diperlukanya seesorang pemimpin yang mampu dijadikan sebagai panutuan seperti halnya pemerintah, karena dengan melalui upaya, bantuan, dan intervensi pemerintah diharapkan PKL akan semakin berdaya, yang pada giliranya PKL menjadi lebih sejahtera didalam penghidupanya.

Menurut Ibnu Khaldun khilafah merupakan pemerintah yang berlandaskan agama yang memerintahkan rakyatnya dapat sesuai dengan petunjuk agama, baik dalam keduniawian maupun akhirat. Menurut Ibnu Khaldun model pemerintahan yang seperti ini model terbaik. Karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin, tidak saja kemaslahatan didunia saja melainkan juga akhiratnya.⁴⁹ Serta yang dipakai adanya asas kebijaksanaan pemerintah, yaitu ajaran agama, khususnya dalam agama Islam, maka dalam hal ini, kepala negara disebut dengan khalifah dan imam. Khalifah merupakan pengganti Nabi didalam memelihara kelestarian agama serta kesejahteraan duniawi masyarakatnya.

⁴⁸Hanna Widyani, "Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis terhadap Teori 'Ashabiyyah), *Journal Manthiq*, Volume 3, No 2, (2019), 9.

⁴⁹Ibid., 10.

Sedangkan imam dalam Islam sebagai pemimpin, ibarat imam didalam shalat merupakan yang harus diikuti oleh rakyatnya (makmum).⁵⁰

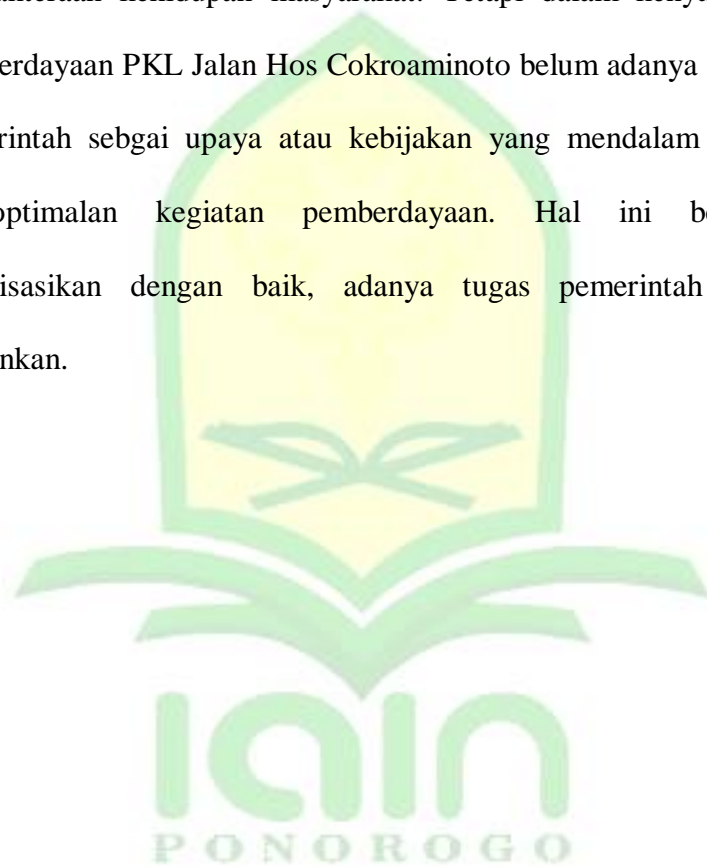
Dalam perspektif Islam pemerintah sebagai khalifah yang bertugas menjalankan tugasnya mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberikan dukungan atau mengarahkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam mengoptimalkan pemberdayaan PKL, guna tercapainya kemaslahatan dunia dan akhiratnya.⁵¹

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PKL Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dengan membentuk paguyuban, dengan berbagai program yang dijalankan. Salah satu tujuan adanya program pemberdayaan ini sebagai penguat didalam bidang ekonomi. Namun didalam teori Islam ditegaskan bahwasanya Islam sebagai agama pemberdayaan, menjelaskan pemberdayaan itu sifatnya harus *kaffah* (menyeluruh), dengan tujuan agar manusia dapat berubah secara utuh dari berbagai aspek, seperti halnya aspek material dan spiritualnya. Dalam Islam Spritualisme memiliki tujuan utama yaitu sebagai peningkatan kualitas iman taqwa, meningkatkan akhlaq, kualitas ibadah, serta dapat tercapainya perdamaian hakiki dan keselamatan dunia maupun akhiratnya. Jadi semakin tinggi tingkat pemberdayaan yang berlandaskan dengan teori Islam, maka akan lebih mendekatkan hubungan seesorang dengan Tuhanya, sehingga akan

⁵⁰Abdurahman, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al Fiqr, 2006), 191-193.

⁵¹ Ibid.

terwujudnya pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi untuk dunianya saja namun juga akhiratnya. Sedangkan dalam teori Islam dijelaskan bahwasanya, pendukung tertinggi didalam pemberdayaan masyarakat yaitu pemerintahan. Karena dalam Islam pemerintah sebagai khalifah yang bertugas menjalankan tugasnya mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan kehidupan masyarakat. Tetapi dalam kenyataanya dalam pemberdayaan PKL Jalan Hos Cokroaminoto belum adanya dukungan dari pemerintah sebgai upaya atau kebijakan yang mendalam guna sebagai pengoptimalan kegiatan pemberdayaan. Hal ini berarti belum terealisasikan dengan baik, adanya tugas pemerintah yang harus dijalankan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang mengacu kepada masalah dan ditinjau penelitian yang telah di paparkan pada halaman-halaman sebelumnya tentang pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo dalam perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan secara mandiri dengan membentuk kelompok atau paguyuban yang dinamakan mekar sore. Pembentukan paguyuban ini didasari adanya persamaan nasib sesama PKL, dengan tujuan dibentuknya untuk memperkuat eksistensi mereka dalam mempertahankan hak-hak PKL serta sebagai upaya kemandirian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan demi terwujudnya kesejahteraan PKL bersama. Sedangkan Pemerintah hanya melakukan pembinaan.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemberdayaan yang pertama yaitu tingginya solidaritas antara PKL. Sedangkan faktor yang ke dua yaitu ketidak pedulian pemerintah. Dengan adanya faktor Ketidak pedulian pemerintah ini seperti adanya pembiaran, belum adanya pengupayaan secara maksimal dari pemerintah seperti halnya, pelatihan

maupun bimbingan untuk PKL didalam pemberdayaan. Fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengarahkan masyarakat terhadap kemandirian dan juga pembangunan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam, bahwasanya Islam sebagai agama yang sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam, diantaranya diwujudkan dengan cakupan ajarannya yang mencakup semua lini kehidupan manusia, apalagi lini kehidupan manusia yang berkaitan dengan hajat hidup keseharian mereka, yakni kebutuhan ekonomi. Upaya Pemberdayaan mandiri PKL Jalan Hos Cokroaminoto dengan adanya berbagai program yang telah dilaksanakan bertujuan dalam penguatan ekonomi. Namun dalam Islam selain sebagai penguatan bidang ekonomi juga harus ditekankan sebagai penguatan dalam aspek spiritual. Hidup dengan spritualisme yang tinggi berarti adanya sebuah kehidupan yang berada dalam kondisi iman yang baik serta memiliki cara hidup yang lebih totalitas, karena segala sesuatunya diukur dari kesesuaian dengan aqidah dan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama di lapangan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PKL Jalan Hos Cokroaminoto

Untuk menyarankan dan juga mengharapkan agar pemberdayaan yang dilakukan secara mandiri kedepanya dapat

memperluas jaringannya dan kedepannya dapat menjadi PKL yang berorientasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti halnya adanya program-program pemberdayaan yang lebih ditekankan terhadap pemberdayaan spiritual sebagai keseimbangan mencari arti dan makna didalam sebuah kehidupan. Dengan begini akan terwujudnya masyarakat yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhiratnya.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan program-program pemberdayaan dan juga memberikan dorongan serta semangat terhadap PKL agar memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah dapat melakukannya dengan memberikan sentuhan-sentuhan terhadap PKL, seperti halnya adanya pendampingan, bimbingan, pelatihan kewirausahaan dan permodalan secara langsung untuk terjun ke lapangan, agar tercapainya keberhasilan pemberdayaan PKL yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abdurrahman. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al Fiqr, 2006.
- Alijaya, Adudin. *Argumen Ekopedagogi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Ananda, Anugerah Dewi, dkk. 2019. "Arisan Rumah Sebagai Upaya mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,". *Journal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 8, No. 3.
- Anggit, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Peneletian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anjaya, Bangun Dwi. "Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media Anggota IKAPI, 2006.
- Anshorie, Asep. 2015. " Peranan Komunikasi Kelompok dalam Menciptaka Keharmonisan Antar Anggota Komunitas Pengajian Barokah SekumpulMushala Ar-Raudah Loa Bakung Samarindah,". *JournalKomunikasi*, Vol, 3, Vol. 4.
- Antologi PAI*, Suhardi. Medan: CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2021.
- Anwar, Moch. Khoirul. 2011. "Penguatan Ekonomi Umat Melalui Lembaga Keagamaan,". *Journalel-Qitsi*, Vol. 1, No. 1.
- AR, Hanta Yuda. *Jejak Para Pemimpin*. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2014.
- Arwani, Agus, dkk. *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi melalui Distribusi Zakat Produktif*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2022.
- As-Sirjani, Raghieb. *Solidaritas Islam untuk Dunia*. Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2015.

- Ashari, K.H. Hasyim. 2017. "SPIRITUALISME DALAM ISLAM",. *Journal Hukum dan Keadilan*, Vol.4, No. 2.
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017.
- Bustami. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Ekonomi Islam*. Ciputan: A-Empat, 2015.
- Cardona, David. *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Media Pustaka, 2020.
- Chaniago, Siti Aminah. 2015. "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan,". *Journal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1.
- Dono, Bagus Eko. *Srategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*. Bondowoso: Guepedia, 2021.
- Ekasari, Ratna. *Modal Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE PUBLISHING, 2022
- Fachrunissa, Reviva dkk. 2021. "Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Makassar,". *Jurnal DPMR*, Volume 1, Nomor 2.
- Fahmi, Mutiara. 2017. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran,". *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 2, No. 1.
- Falah, Asep Saeful. *Monograf Analisis Tingka Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Koperasi Pedagang Pasar*. Surabaya: CV. Globar Aksara, 2022.
- Handayani, Mita. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima." *Skripsi*, Pekanbaru: 2019.
- Hayim, Muhammad, dan Oky Gusra. 2014. "Pelestarian Tradisi Uang Jimpitab di Lingkungan Dusun Ngepuh Lor, Desa Banyusidi, Pakis, Magelang, Jawa Tengah,". *JurnalInovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 3.
- Herwansyah. 2021. "Kebijakan Hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Studi Kasus Kawasan Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara,". *Journal Penelitian*, Volume 1, Nomor 1.
- Ilyas, Rahmat. 2016. "Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam,". *Journal*, Vol. 1, No. 7.

- Indrian, Ema. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Ekonomi Islam." *Skripsi*, Lampung: 2018.
- Iqbal, Muhammad. 2016. "Mewujudkan Kesadaran Energi Melalui Konsep Khalifah Fial-'Ard,". *Journ Penelitian*, Vol. 13, No. 2
- Isnaeniah, Erni. *Bersinergi Positif di Tengah Pandemi Bersama Warga*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Iswahyudi. 2017. "Peranan Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Pembangunan pada Kampung Insumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori,". *Journal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 12, No. 1.
- Juliasty, Sari. *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*. Jakarta: PT Persero Balai Pustaka, 2009.
- Khila, Merli Ummu. *Yuk Ta'aruf*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Kurnia, Ayumila. "Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Program Kotaku,". *Journal Ilmu Dakwah*, Vol. 3. No. 1.
- Lestari, Dian. 2018. "Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga,". *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, Volume 2, Nomor 2.
- Machendrawati, Nanih, dan Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Madjid, Muh. Naim. (2021) "*Membangun Ekonomi Kreatif Warga Desa Lencoh Melalui Produksi Sistik Berbasis Ta'awub*,". *Artikel*. Yogyakarta: UMY, 2021.
- Makmuri, Ervita Putri. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Skripsi*, Malang: 2018.
- Maryam, Siti. *SAMISAKE Sebagai Model Pembangunan Pedesaan*. Lampung: CV. GRE PUBLISHING, 2016.
- Maryani, Dedeh. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2009.
- Masrul, dkk. *Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

- Maulana, Bani Syarif. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Produktif Melalui Pembentukan Baitul Tamwil Berbasis Masjid di Grumbul Kalirajut Desa Notog Kab. Banyumas," *Journal Pengabdian*, Vol. 2, No. 1.
- Mawa'izh. 2017. "Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Journal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.8, No. 1.
- Mega, Dwi Aryani. 2018. "Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar," *Journal Profitability Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2.
- Miradj, Safri, dan Imam Shofwan. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nainggolan, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Nainggolan, dkk. *Komunikasi Organisasi 2021*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Noor, Munawwir. 2011. "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 6, No. 1.
- Norman, Nurathirah Aprillah dkk. 2020. "Adaptive Governance dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju," *Jurnal KIMAP*, Volume 1, Nomor 1.
- Nurfitria, Siti. 2011. "Hubungan Antara Rekreasi di Akhir Pekan dengan Motivasi Kerja Karyawan FISIB Universitas Trunojoyo Madura," *Journal Personifikasi*, Vol. 2, No. 2.
- Nurhadi. (2019). "Pedagang Kaki Lima Perspektif Islam," *Artikel Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Octaviani, Sheila Lucky, Puspitasari, Ardiana Yuli. 2021. "Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima," *Journal Kajian Ruang*, Vol. 1, No. 1.

- Okvian, Regita Nur, dan Nawangsari, Ertien Nining. 2019. "Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya,". *Journal Public Administration*, Vol. 1, No. 2.
- Patilaiya, Hairudin La, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Pratiwi, Zelin Dinda, dkk. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Rachim, Tsalisa Putriani. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Skywalk Teras Cihampelas)." *Skripsi*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2018.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia, 2014.
- Ritonga, Anas Habini. *Gerakan Dakwah Muhammadiyah dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi*. Lampung: CV Agree Media Publishing, 2020.
- Rivai, Veithzal, dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics dan Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rohmatin, Siti Alvi. 2016. "Studi Eksploratif Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya,". *Journal Ilmu Administrasi Agama*, Vol. 4, No. 3.
- Roselin, Ruth. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.
- Rosmaladewi, Okke. *Manajemen Kemitraan Multistakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: DEEPUBLIHS, 2018.
- Saeful, Achmad, dan Sri Ramdhayanti. 2022. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam,". *Journal Syar'e*, Vol. 3, No. 2.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Sany, Ulfi Putra. 2019. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Al-Qur'an,". *Journal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 1.
- Sanrego, Yulizar D, dan Moch Taufik. *Fiqih Tamkim Fiqih Pemberdayaan*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Sanusi, Uci. *Kenali Dirimu Upaya Memahami Manusia dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

- Sari, Siska Devi Ratna. *Fungsi Aset Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim* (Jaka¹ Mujahidah, *Aspek Kecerdasan Spiritual dalam Al-Qur'an: Surah Al-Lukman Ayat 12-19*. Pekalongan:NEM, 2022.
- Sarjono, Joki Joko, dkk. 2014. "Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur,". *Journal Program Magister Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran:Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2004.
- Srifariyati. 2019. "Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS.An-Nisa: 58-59,". *Journal Madaniyah*, Vol. 9, No. 1.
- Sriharyati, Santy dan Milla Marlina. 2021. "Penataan Pasar sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat," . *Jurnal Admistrasi Bisnis*, Volume 7, Nomor 1.
- Sugeng, Esmara, dan Kunantioroni. 2016. "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras dengan Tata Ruang Wilayah Kab. Batang,". *Journal Riset, Inovasi dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukirno, Agus. *Pengantar Bimbingan dan Konseling Islam*. Serang Banten: A-Empat, 2012.
- Sunardi, dan Leo Agung. 2018. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekonomi Islam,". *JournalWasiqotul*, Vol.12, No. 2.
- Susanto, Eko. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro." *Skripsi*, Lampung: 2019.
- Sutikno. *Strategi dan Teknik Penelitian*. Medan: Guepedian, 2022.
- Yureta Wahyu Caesar. "*Analisis Comunity Empowerment Berbasis Retail Location Decision* dalam Kebijakan Pemberdayaan dan Penataan PKL (Studi Kasus PKL Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo)." *Skripsi*, Surabaya: Universita Airlangga, 2019.
- Wasiqotul, dkk. 2018. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi PersentifEkolpgis dalam Ajaran Islam,". *Journal Penelitian*, Vol. 12, No. 2.

- Widayat, Wahyu Egi, dkk. *Penguatan AswajaAnnahdliyah*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Widya, Hanna. 2018. "Konsep Pemerintahan Islam.dalam Pandangan Ibnu Khaldun,". *Journal Manthiq*, Vol. 3, No. 2.
- Widyani, Hanna. 2019. "Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis terhadap Teori 'Ashabiyyah)," *Journal Manthiq*, Volume 3, No. 2.
- Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- W, Sri Koeswantono. 2014. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam pada Ibu-Ibu Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogoer,". *JournalSarwahit Ilmu Pendidikan*, Vol. 11, No.2.
- Winanto, Asis Riat, Wafirotn, Khusnatul Zulva. 2016. "Pemberdayaan Sektor Informal di Kabupaten Ponorogo,". *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 2, No. 2.
- Zakarsih. *Analisis Penerapan Nilai-NilaiMaqashidSyarariah pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Pekalongan: NEM-Anggota IKAPI, 2021.







